

**EFEKTIFITAS PEMBERDYAAN EKONOMI MASYARAKAT DIMASA PANDEMI
COVID-19 DIKECAMATAN SINJAI UTARA
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

Oleh:

Nama :Syekh.a.abd.alfalah.Junaid

NIM :105431101616

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA KEWARGANEGARAAN**

2023

**EFEKTIFITAS PEMBERDYAAN EKONOMI MASYARAKAT DIMASA PANDEMI
COVID-19 DIKECAMATAN SINJAI UTARA
KABUPATEN SINJAI**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

Nama : Syekh.a.abd.alfalah.Junaid
NIM : 105431101616

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA KEWARGANEGARAAN
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi :Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dimasa Pandemi (Covid-19) Dikecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Nama :Syekh. A. Abd. Alfalah Junaid

Nim :105431101616

Program Studi :Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN)

Fakultas :Keguruan & Ilmu Pendidikan

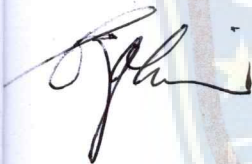
Setelah diperiksa dan diteliti, maka Skripsi ini telah memenuhi syarat dan layak untuk diujikan

Makassar, 28 Februari 2023

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. A. Rahim, M.Hum.



Dr. Suardi, M.Pd.

Diketahui oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar

Ketua Prodi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934



Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461


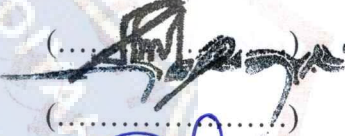


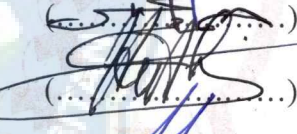
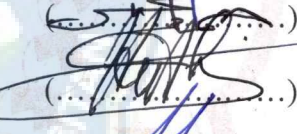
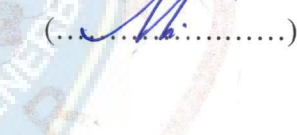
LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Syekh.A. Abd. Alfalah Junaid, NIM: 105431101616 diterima & disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 102 Tahun 1444 H/2023 M Pada tanggal 05 Sya'ban 1444 H/25 Februari 2023 M, Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023.

Makassar 08 Sya'ban 1444 H

28 Februari 2023

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. 
2. Ketua : Erwin Akib, M. Pd., Ph.D. 
3. Sekretaris : Dr. Baharullah, M.Pd. 
4. Penguji :
 1. Dr. Muhajir, M.Pd. 
 2. Dra. Jumiati Nur, M.Pd. 
 3. Dr. Hidayah Quraisy, M.Pd. 
 4. Dr. Suardi, M.Pd. 

Disahkan oleh :

Dekan FKIP
Unismuh Makassar



Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

Ketua Prodi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syekh.a.abd.alfalah junaid
Nim : 105431101616
Program Studi : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan & Ilmu Pendidikan
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PEMBERDYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DIMASA PANDEMI COVID-19 DIKECAMATAN SINJAI UTARA
KABUPATEN SINJAI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah hasil karya sendiri & bukan hasil ciptaan orang lain atau di buatkan oleh siapapun.

Demikianlah pernyataan yang saya buat & saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar

Makassar, **22 agustus** 2023

Yang membuat pernyataan.



(.....)

Syekh.a.abd.alfalah junaid

SURAT PERJANJIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syekh.a.abd.alfalah junaid
Nim : 105431101616
Program Studi : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan & Ilmu Pendidikan
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PEMBERDYAAN EKONOMI MASYARAKAT
DIMASA PANDEMI COVID-19 DIKECAMATAN SINJAI UTARA
KABUPATEN SINJAI

Desa Bongki, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan ini menyatakan perjanjian sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya akan menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun)
2. Dalam penyusunan skripsi, saya akan selalu melakukan konsultasi dengan pembimbing yang telah ditetapkan oleh pembimbing fakultas.
3. Saya tidak akan melakukan penciplakan (Plagiat) dalam penyusunan skripsi.
4. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada 1, 2, 3 & 4 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 22. agustus 2023

Yang membuat pernyataan.



(.....)

Syekh.a.abd.alfalah junaid

MOTO

“BERMIMPILAH SETINGGI LANGIT, AGAR JIKA
ENGKAU JATUH NGKAU AKAN JATUH DIANTARA BINTANG-BINTANG”

Ir.Seokarno

Sistem pendidikan yang bijaksana setidaknya akan mengajarkan kita betapa sedikitnya yang belum diketahui oleh manusia, seberapa banyak yang masih harus ia pelajari.

Sir John Lubbock

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadanya kami menyembah dan kepadanya kami memohon pertolongan sekaligus sebagai ungkapan terimakasih kepadanya.

Kedua orang tuaku, saudaraku, ketua Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pembimbing saya, Keluarga saya, sahabat dan teman-teman atas saran, keikhlasan dan doanya dalam mendukung penulis mewujudkan harapan menjadi kenyataan.

ABSTRAK

SYEKH.A.ABD.ALFALAH JUNAID. 2022 efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai (Dibimbing Oleh Dr. A. Rahim, M.Hum. & Dr.Suardi, M.Pd.)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Tipe penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jumlah informan 6 orang. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi 4 komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengabsahan data adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai melalui 2 indikator dari efektivitas program pemberdayaan masyarakat yaitu 1. Bagaimanakah efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.? 2. Bagaimanakah Dampak efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.?

Dalam pelaksanaan program tersebut dimana pihak pemerintah belum bisa menyesuaikan dirinya dengan anggota kelompok mekar karena dalam proses pelaksanaan program tersebut pihak pemerintah kadangkala hanya memberikan sosialisasi saja tanpa mendampingi anggota kelompok dalam proses pengolahan dana desa

Kata Kunci : Efektivitas, Pemberdayaan Masyarakat, Komunitas

ABSTRACT

SYEKH.A.ABD.ALFALAH JUNAID. 2022 efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai (Dibimbing Oleh Dr. A. Rahim, M.Hum. & Dr.Suardi, M.Pd.)

This study aims to determine how effective community empowerment is in development during the COVID-19 pandemic in North Sinjai sub-district, Sinjai Regency. This type of research is qualitative research. This type of research is descriptive qualitative. Sources of data in this study are primary data and secondary data. The number of informants is 6 people. Data collection techniques are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques include 4 components, namely data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Validation of data is source triangulation, technique triangulation and time triangulation. Results Based on research shows that the effectiveness of community empowerment in development during the covid-19 pandemic in North Sinjai sub-district, Sinjai Regency through 2 indicators of the effectiveness of community empowerment programs, namely 1. How is the effectiveness of community economic empowerment during the covid-19 pandemic in North Sinjai sub-district, Sinjai Regency .? 2. What is the impact of the effectiveness of community economic empowerment during the COVID-19 pandemic in North Sinjai sub-district, Sinjai Regency?

In the implementation of the program where the government has not been able to adjust itself to members of the blooming group in the implementation of the program, the government sometimes only provides socialization without the help of group members in the processing of village funds.

Keywords: Effectiveness, Community Empowerment, Community

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh Segala bentuk pujian hanya milik Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan berkah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai** yang merupakan suatu syarat penyelesaian studi Jurusan Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis tentunya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan yang disengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja, termasuk dalam penulisan skripsi ini yang tentunya menemui hambatan, dan kesulitan sehingga untuk menjadi lebih baik membutuhkan doa dan dukungan yang merupakan perantara penulis dengan sang pencipta baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang tua penulis yang tercinta, Andi Junaid dan Syarifah Nur Fadli sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada hingga kupersembahkan karya ini untuk Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayangnya dan motivasinya sehingga skripsi ini selesai dengan baik di waktu yang tepat.
2. Bapak Dr. A. Rahim, M.Hum. selaku pembimbing I (satu) dan Bapak Dr. Suardi, M.Pd. selaku pembimbing II (dua) yang senantiasa meluangkan waktunya dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik di waktu yang tepat.
3. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag
4. Bapak Dr. Muhajir, M.Pd. selaku Ketua Jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKN) Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Para Dosen, dan staf Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan bekal pengetahuan bagi penulis selama menjalani proses perkuliahan.

6. Kepala Kelurahan Bongki, serta Bapak-ibu rumah tangga (Kelompok Mekar) yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi informan penulis selama proses penelitian berlangsung.
7. Keluarga, sahabat, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak bisa ku ucapkan satu persatu yang telah memberikan banyak motivasi untuk selalu kuat dan sabar untuk menjalani lika liku untuk menyelesaikan pendidikan S.1 di Universitas Muhammadiyah Makassar,

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan karena segala sesuatu yang sempurna itu hanya milik Allah SWT dan oleh karena itu demi mendekati kesempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 22 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan.



(.....)

Syekh.a.abd.alfalah junaid

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
SURAT PERJANJIAAN.....	vi
MOTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I .PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II .KAJIAN PUSTAKA.....	5
A. Kajian Pustaka.....	5
1. Pengertian Efektifitas.....	5
2. Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi (covid 19).....	6
3. Perekonomian Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Masa Pandemi.....	12
4. Masa Pandemi (Covid 19).....	16
5. Hasil Penelitian Yang Relevan.....	19
B. Kerangka Berpikir.....	22
BAB III .METODE PENELITIAN.....	26
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	26
C. Sumber Data.....	27
D. Instrumen Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Teknik Analisis Data.....	30

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	32
B. Deskripsi Karakteristik Responden.....	36
C. Hasil Penelitian.....	38
D. Pembahasan.....	41
BAB V. PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA.....	47
Lampiran-Lampiran.....	51
PEDOMAN WAWANCARA.....	52
PEDOMAN OBSERVASI.....	79
LEMBAR DOKUMENTASI.....	87
Foto.....	88
Permohonan Kesediaan Pembimbing.....	90
Persetujuan Pembimbing Proposal.....	91
Lembar Konsultasi Bimbingan Proposal.....	92
Berita Acara Ujian Proposal.....	93
Lembar Perbaikan Proposal.....	94
Pengantar Penelitian.....	95
Surat Keterangan Penelitian Kantor Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.....	96
Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi.....	97
Lembar Pengesahan Pembimbing Skripsi.....	99
Lembar Persetujuan Pembimbing Skripsi.....	100
Surat Keterangan Bebas Plagiat.....	102
Dafatar Riwayat Hidup.....	103

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan penelitian ini membangun masyarakat terkait erat dengan memberdayakan masyarakat. Memberdayakan masyarakat bertujuan memerangi kemiskinan, kesenjangan, dan mendorong masyarakat menjadi lebih aktif serta penuh inisiatif. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Salah satu pengembangan potensi manusia dapat diwujudkan melalui kegiatan pendidikan berbasis kemasyarakatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (geografis, lembaga, masyarakat, dan lain-lain), pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat gambaran atau memberikan informasi secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta yang ada.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kegiatan ini menekankan pentingnya memahami kebutuhan masyarakat dan cara pemecahan permasalahan oleh masyarakat dengan memperhatikan potensi yang ada di lingkungannya. edia menempatkan diri sebagai orang lain.

Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat bawah (grass root) yang dengan segala keterbatasannya belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan, sehingga pemberdayaan masyarakat tidak hanya penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosial yang ada. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian penting dalam upaya pemberdayaan.

Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan antar individu, dengan dikotomi subjek (penguasa) dan objek yang dikuasai meliputi kaya-miskin, laki-laki perempuan, guru-murid, pemerintah-warganya, serta antaragen pembangunan dan si miskin. Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subjek dan objek tersebut merupakan relasi yang ingin “diperbaiki” melalui proses pemberdayaan.

Adanya Undang-undang nomor 12 tahun 2008 perubahan atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa: “Pemerintah Daerah memberikan peluang yang sangat besar atas peran serta masyarakat dalam pembangunan

daerah; Penggunaan wewenang pemerintahan dalam perencanaan dan pembentukan kebijakan daerah secara tidak tepat dapat berakibat fatal dan kontra produktif?.

Dengan mengacu pada undang-undang tersebut, kepemimpinan daerah yang efektif maka peraturan daerah juga akan baik, Sehingga, keberadaan desa baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis *system* kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan yang stabil dan dinamis. Sehingga desa merupakan *miniature* dan *sample* yang sangat baik untuk mengamati secara seksama interaksi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Partisipasi masyarakat perkotaan dalam pembangunan, mungkin saja dapat ditingkatkan melalui penguatan kapasitas para tokoh-tokoh masyarakat yang ada melalui pengaru yang diberikan, namun sayangnya tokoh-tokoh masyarakat sendiripun belum memainkan peran yang maksimal dalam kegiatan mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi. Tokoh masyarakat cenderung mempunyai kedekatan ikatan emosional dengan masyarakat, maka untuk mengakomodir berbagai gagasan-gagasan untuk kepentingan masyarakat, tokoh masyarakat diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Keberadaan tokoh masyarakat, cenderung masih terikat oleh nilai-nilai lama yakni tradisi dan ikatan kulturalnya. Kekuatan tokoh memang masih bertumpu pada ikatan primordial, khususnya ikatan keluarga (famili) dan kesukuan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk menumbuhkan kesadaran dan kemauan serta kemampuan masyarakat dalam mengenali memelihara dan melindungi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan Masyarakat dalam masa pandemi covid-19 adalah segala upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat agar berdaya dan mampu berperan penting serta mencegah penularan covid-19 ini. Pemerintah tingkat pusat sampai pemerintah desa bahkan sampai tingkatan RW dan RT telah menerapkan protocol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus corona. Masyarakat melakukan isolasi mandiri dirumah. Sehingga masyarakat tidak dapat bekerja atau melakukan aktivitas-aktivitas. Tatanan ekonomi masyarakat yang masih banyak butuh perhatian semakin terpuruk dengan dampak virus corona, masyarakat kalangan kelas menengah kebawah sangat rentan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Undang-Undang RI NO.6 Tahun 2020.

Tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 menyatakan bahwa untuk penanganan dan penyebaran pandemi covid-19 di desa melalui dana desa dapat digunakan untuk bantuan tunai dari anggaran penduduk miskin desa, perlunya melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam Menti Desa, serta Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara menjamin eksistensi keberadaan desa sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Penggunaan dana desa sesuai pada peraturan Menteri Desa Nomor 06 tahun 2020, anggaran dana desa digunakan untuk pelaksanaan desa tanggap covid-19. Pada masa pandemi seperti ini pemerintah memprioritaskan dua hal yaitu: pertama, pembangunan infrastruktur untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat dan prioritas, kedua adalah penguatan kesehatan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan covid-19. Pandemi covid-19 ini telah mempengaruhi normalitas perilaku masyarakat salah satunya adalah berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara yang menyeluruh perekonomian kota dan perekonomian desa. kebijakan pemanfaatan anggaran dana desa diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur daya tahan ekonomi dan pendapatan desa. Berdasarkan pernyataan di atas, serta pentingnya pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 dan penggunaan dana desa yang sesuai dengan Undang-Undang pemerintah, maka diharapkan keseluruhan dari pemerintah desa dapat mengimplementasikan dana desa ini dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Bertitik tolak dari uraian tersebut maka merupakan hal yang menarik untuk diangkat menjadi suatu bahan penelitian dengan judul **“efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.?
2. Bagaimanakah Dampak efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.?

C. Tujuan Penelitian

Dalam setiap penelitian idealnya memiliki tujuan tertentu. Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.?
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.?

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa, penilliti atau mereka yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang Pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Bagi pemerintah diharapkan dapat memberi gambaran mengenai konsep program pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga dapat meningkatkan pembangunan di kecamatan Sinjai Utara agar lebih efektif dan efisien.
3. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai konsep program pemberdayaan sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dengan indikator yang menjadi tolak ukur merupakan gambaran seberapa besar efektivitas dari kebijakan tersebut. Dengan kata lain sebuah kebijakan itu disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang memiliki makna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. (D. Desa, 2021)

Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan seberapa jauh suatu target yang sudah diraih oleh manajemen seperti kualitas, kuantitas, dan waktu. Yang mana target tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu. Secara singkatnya efektivitas adalah upaya tertentu atau suatu tingkat keberhasilan yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu perusahaan.

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran. Efisiensi dalam menggunakan masukan akan menghasilkan produktivitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya. Hal yang paling rawan adalah apabila efisiensi selalu

diartikan sebagai suatu penghematan, karena bisa mengganggu operasi, sehingga pada gilirannya akan mempengaruhi hasil akhir, karena sasarannya tidak tercapai dan produktivitasnya juga setinggi yang diharapkan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas berasal dari kata dasar efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang di tuju. Efektivitas menunjukkan pada taraftercapainya hasil, sering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektivitas menekankan pada hasil yang di capai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang di capai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.

2. Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi (COVID-19)

a. Pengertian pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi Desa, pengembangan lembaga keuangan Desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya.

Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up, antara growth strategy dan people centered strategy. Sedangkan di tingkat praksis, proses interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi. Maka, konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based development). Community development adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain (di luar sistem sosialnya) untuk menjadikan sistem masyarakat sebagai suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik, mengembangkan dan meningkatkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai langkah meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya.

Terkait dengan pemahaman ini pemberdayaan konteks masyarakat adalah kemampuan individu dalam bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan masyarakat adalah unsur- unsur yang

memungkinkan suatu masyarakat bertahan (survive), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok).

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya, terutama di pedesaan tidak cukup hanya dengan upaya meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan usaha yang sama atau modal saja, tetapi harus diikuti pula dengan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat, mendukung berkembangnya potensi masyarakat melalui peningkatan peran, produktivitas.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan, atau kemampuan kepada individu masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai dan budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial budaya.

Dengan demikian keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari masyarakat menjadi dinamis dan aktif berpartisipasi didalam membangun diri mereka. Tidak menggantungkan hidupnya kepada belas kasihan orang lain. Masyarakat berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupan baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan inspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yaitu yang bersifat “people-centered, participatory, empowering, and sustainable.” People centered merupakan tatanan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan masyarakat dan dalam prosesnya pun dominan dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat diposisikan sebagai pemeran utama dalam melakukan pengambilan keputusan, pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus pengawasan dan pertanggungjawaban secara terbuka dilakukan oleh dan untuk masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang amat penting bagi pembangunan masyarakat dan Negara, karena dengan pemberdayaan yang tepat sasaran dan terencana dengan baik akan menghasilkan masyarakat yang memiliki berkualitas sehingga mampu menciptakan suasana pembangunan yang dinamis dan berkesinambungan.

b. Tujuan pemberdayaan masyarakat

Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan kualitas masyarakatnya, serta bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan masyarakat, melalui sarana prasarana, melalui sumber daya alam yang terdapat dalam desa tersebut, membangun gerak perekonomian lokal sesuai dengan sumber daya alam yang ada dan sesuai dengan kemampuan masyarakatnya, serta pembangunan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. Proses pembangunan masyarakat suatu desa dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MPPD). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa mengutamakan skala prioritas, program, kebutuhan, kegiatan, dan tujuan pembangunan suatu desa yang didanai oleh Anggaran Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah setempat berdasarkan pengajuan kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Pembangunan Masyarakat Desa pada dasarnya adalah bertujuan untuk mencapai

suatu keadaan pertumbuhan dan peningkatan untuk jangka panjang dan sifat peningkatan akan lebih bersifat kualitatif terhadap pola hidup warga masyarakat, yaitu pola yang dapat mempengaruhi perkembangan aspek mental (jiwa), fisik (raga), intelegensia (kecerdasan) dan kesadaran bermasyarakat dan bernegara. Salah satu misi yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah membangun harmonisasi antara berbagai kutub perencanaan yang ada, yaitu perencanaan teknokratis, perencanaan politis, perencanaan partisipatif.

Untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik dalam pembangunan desa maka diperlukannya kemitraan. Dalam hal ini kemitraan yang dilihat adalah kemitraan antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa, baik LPMD maupun Kepala Desa harus saling bekerja sama dalam proses perencanaan agar pembangunan yang ini dilaksanakan dapat tercapai.

Output dan tujuan suatu kegiatan yang telah direncanakan sangatlah berkaitan, efektifitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dalam artian efektifitas merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam pengertian teoritis atau praktis, tidak ada persetujuan yang universal mengenai apa yang dimaksud “Efektivitas”.

Dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat untuk berkembang, pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik itu di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) meliputi: (a) Memelihara kerukunan hidup warga masyarakat; (b) Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa; (c) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; (d) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; (e) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; (f) Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Secara umum dalam melaksanakan tugasnya yaitu membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat desa, tugas lembaga kemasyarakatan meliputi menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong

royong dan swadaya masyarakat; menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

c. Sasaran pemberdayaan masyarakat

Didalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menduduki masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif, bukan penerima pasif, konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok pemberian kekuatan kepada masyarakat.

Dalam pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Jika tidak, maka jurang pemisah antara kota dan desa akan semakin tinggi terutama dalam hal perekonomian.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memuat tentang pelimpahan wewenang pemerintah kepada daerah untuk mengatur hal tersebut, daerah diberi hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya masing-masing berdasarkan aspirasi masyarakat. Hal ini akan semakin menambah peran strategis pemerintah dalam menempuh kebijakan yang dapat melahirkan program atau kegiatan pembangunan secara terpadu, termasuk didalamnya upaya yang mampu menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dengan adanya dana desa ini maka setiap desa wajib melakukan pembangunan desa, dan merubah pola pikir serta sikap mental mereka, salah satunya melalui program-program yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

d. Tahapan dan strategi pemberdayaan masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok individu yang sistem, tradisi, kesepakatan, serta hukumnya sama serta saling terpaud dan menuju pada kehidupan kolektif. Masyarakat merupakan beberapa individu yang menjadi satu dalam kehidupan kolektif sebab kebutuhan

serta pengaruh kepercayaan, pikiran, serta tekad tertentu. Sistem serta hukum yang terdapat dalam masyarakat mencerminkan tingkah laku individu. Dikarenakan, individu terikat oleh hukum serta sistem tersebut.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi pembangunan sekarang sudah banyak diterima, bahkan telah berkembang berbagai pemikiran dan literatur tentang hal tersebut. Meskipun dalam kenyataannya strategi ini masih belum maksimal di aplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Disamping itu banyak pemikir dan praktisi belum memahami dan meyakini bahwa partisipatif dapat digunakan sebagai alternatif dalam memecahkan persoalan pembangunan yang dihadapi.

Pemberdayaan masyarakat diperankan oleh pemerintah daerah dan perangkatnya (sebagai community worker) dapat melalui kedua proses yang dikemukakan sebelumnya yaitu: (1) proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan kekuatan atau kemampuan kepada warga di daerah setempat agar warga tersebut menjadi lebih berdaya, melalui upaya memfasilitasi aset material guna mendukung pembangunan kemandirian warganya, dan (2) proses yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi warga di daerah setempat agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Adapun strategi implementasinya harus mengacu pada kebijakan pemberdayaan masyarakat yang telah disusun oleh pemerintah daerah setempat bersama warga setempat, dengan menggunakan pendekatan direkif atau pendekatan non-direktif, dan mengutamakan interveinsi makro.

Dilain pihak konsep pembangunan yang selama ini diterapkan belum mampu menjawab tuntutan-tuntutan yang menyangkut keadilan dan pemerataan serta keberpihakannya kepada masyarakat, sehingga pembangunan yang digagas belum mampu mengangkat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan kepada kepentingan masyarakat, sepertinya tidak dapat dilepaskan dari upaya pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam pembangunan dimaksud. Berbagai kendala dalam penerapan disebabkan adanya perbedaan persepsi dalam menyikapi tentang pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara umum masyarakat merupakan beberapa manusia yang memiliki tujuan yang sama dan menggambarkan satu golongan yang saling berkaitan. Semacam;sekolah, keluarga, perkumpulan. Definisi lain dari masyarakat ialah satuan sosial, sistem sosial, ataupun kesatuan hidup manusia.

Dalam kajian bidang sosiologi dipaparkan ada 2 berbagai warga, ialah warga paguyuban dan warga petambayan. Pada warga paguyuban ada ikatan individu antara anggota- anggota yang memunculkan sesuatu jalinan batin antara mereka. sebaliknya pada warga patembayan ada ikatan pamrih antara anggota- anggotanya.

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah dan perangkatnya adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, perangkat pemerintahan di daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar di dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Hal pemberdayaan masyarakat tersebut tidak terlepas dari ide Griffin yang mengatakan, bahwa persoalan(dan urgensi) kebijakan desentralisasi berkaitan erat dengan persoalan pemberdayaan (empowerment), dalam arti memberikan keleluasaan dan kewenangan kepada pemerintahan ditingkat daerah untuk berprakarsa, serta wewenang dan tanggung jawab dari organisasi pemerintah tingkat daerah untuk dapat menyusun program, memilih alternatif, dan mengambil keputusan dalam mengurus kepentingan daerahnya sendiri.

Pentingnya pemberdayaan masyarakat juga didasarkan pada pemikiran community-based resource manegement (pengelolaan sumberdaya lokal), yang merupakan suatu sosok manajemen pembangunan yang mencoba menjawab tantangan pembangunan, yaitu kemiskinan, memburuknya lingkungan hidup, dan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam proses pembangunan yang menyangkut diri mereka. Pemikiran tersebut merupakan mekanisme perencanaan people- centered development (pembangunan yang berorientasi pada manusia) yang menekankan pada teknologi social learning (pembelajaran sosial) dan strategi perumusan progam yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri mereka (empowerment)

3. Perekonomian Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Masa Pandemi.

a. Pembangunan

Di dalam pembangunan, masyarakat memiliki peranan yang sangat penting karena posisinya sebagai obyek dan subyek dari pembangunan itu sendiri. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi target atau tujuan dari suatu pembangunan tetapi juga dilibatkan di dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini sangat penting karena dengan melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan maka pembangunan yang dilaksanakan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan di desa tentu kebutuhannya akan berbeda dengan pembangunan yang dilaksanakan di daerah perkotaan. Dalam hal ini partisipasi secara langsung masyarakat desa mutlak diperlukan termasuk pembangunan melalui kegiatan pemanfaatan dana

BUMDes yang berbasis potensi lokal.

Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU Desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Program BUMDes sesungguhnya memiliki peran yang strategis dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan mengusung semangat gotong royong program BUMDes tidak hanya memberikan keuntungan berupa pembangunan dalam aspek fisik tetapi juga keuntungan dalam aspek sosial.

Pembangunan masyarakat (community development) mengandung upaya untuk meningkatkan partisipasi dan rasa memiliki (participating and belonging together) terhadap program yang dilaksanakan, dan harus mengandung unsur pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah untuk 1) memiliki akses terhadap sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan ; dan 2) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Kenyataannya seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau pekerja sosial baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional. Para pekerja social ini berperan sebagai pendamping sosial. Pendamping sosial hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan social dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja social untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan.

b. Perekonomi Daerah serta Peran Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Pemerintah Daerah

Pembangunan sektor sosial ekonomi masyarakat perlu diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang didukung oleh organisasi dan partisipasi masyarakat yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kinerja yang secara terus menerus tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun pembangunan masyarakat selalu menjadi fokus perhatian pemerintah sejak lama, namun azas dan strategi pembangunan masyarakat (pedesaan) seringkali

mengalami perubahan. Dalam era reformasi terjadi pergeseran paradigma pembangunan dimana peran pemerintah bukan lagi sebagai “provider” (penyedia) tetapi sebagai “enabler” (fasilitator). Peran sebagai enabler berarti tiap usaha pembangunan harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan masyarakat itu sendiri, yang berarti pula tidak terlalu mengharapkan pemberian bantuan dari pemerintah.

Perubahan paradigma pembangunan dari pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi kearah model pembangunan alternative yang lebih menekankan pada partisipasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat dilanjutkan dan dikembangkan ke seluruh pelosok daerah untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan masyarakat ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk seluruh masyarakat, oleh karena itu pelibatan masyarakat seharusnya diajak untuk menentukan visi (wawasan) pembangunan masa depan yang akan diwujudkan.

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah social atau memenuhi kebutuhan social sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya.

Dalam kenyataannya seringkali proses ini tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyarakat setempat dengan pihak luar atau pekerja social baik yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif professional. Para pekerja social ini berperan sebagai pendamping sosial.

Pendamping sosial hadir sebagai agen perubahan yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan social dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja social untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti :

1. Merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi.
2. Memobilisasi sumber daya setempat.
3. Memecahkan masalah sosial.
4. Menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan.
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konsep pemberdayaan masyarakat.

Jadi, peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat adalah pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dari kelemahan masyarakat, atau

penyiapan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian guna meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta untuk dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri di daerah. Pelaksanaan fungsi pemerintah daerah tersebut dikatakan berhasil apabila masyarakat di daerah setempat telah berdaya dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi, dan politik.

Akses dan penghasilan atas pendapatan bagi setiap orang merupakan hal yang penting karena menyangkut otonominya (kemandirian). Faktor ekonomi tersebut yang berkaitan dengan pemberdayaan psikologi masyarakat, yaitu : (a) pemerintah daerah berupaya mengubah cara berpikir masyarakat yang selama ini masih konvensional ke cara berfikir yang lebih modern (sesuai perkembangan jaman), yang berarti bahwa posisi pemerintah adalah sebagai "agen pembaharu", dan (b) pemerintah daerah perlu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai demokrasi, terutama untuk pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah-mufakat, kegotongroyongan, saling membantu, menghargai pendapat orang lain, dan bekerjasama mencapai tujuan bersama.

c. **Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrumen yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati manfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah. Namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (Bottom-Up) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa untuk didengar.

Partisipasi masyarakat adalah gerak masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan, ikut menikmati hasil dari kegiatan tersebut. dan ikut serta dalam mengevaluasinya. Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses aktif, di mana masyarakat dapat mempengaruhi arah serta pelaksanaan dari pembangunan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dalam arti penghasilan, perkembangan pribadi, kemandirian. serta berbagai yang mereka yakini. Partisipasi adalah proses di mana berbagai pelaku dapat mempengaruhi dan membagi wewenang dalam menentukan inisiatif-inisiatif pembangunan dan keputusan serta pengalokasian berbagai sumber.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan juga menghadapi banyak kendala. Sebagaimana yang terjadi di negara maju banyak faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam mendarang peran serta masyarakat dalam perencanaan. Peran serta masyarakat dalam sistem perencanaan dihadapkan pada berbagai persoalan baik pada level negara bagian maupun lokal. Partisipasi masyarakat menjadi penentu keberhasilan untuk pencegahan penyebaran wabah virus corona atau Covid-19, itu dikarenakan pemerintah tidak akan bisa menangani kasus tersebut tanpa ada peran dari masyarakat.

Dalam kaitannya dengan partisipasi masyarakat desa sebagai salah satu faktor pendukung keberhasilan program-program pembangunan desa, maka dapat dipastikan bahwa partisipasi masyarakat akan dapat diperoleh jika program-program dalam pembangunan memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pencapaian sasaran memerlukan tingkat partisipasi masyarakat dalam penentuan jenis infrastruktur yang akan dibangun. Untuk mencapai sasaran yang kedua dimana kegiatan tersebut dilakukan demi meningkatnya kemampuan masyarakat pedesaan dalam penyelenggaraan infrastruktur, maka diperlukan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan untuk dapat mewujudkannya kondisi kemampuan masyarakat yang diharapkan.

4. Masa Pandemi (COVID 19)

a. Asal Mula Virus Corona

Pada 2 Maret 2020, untuk pertama kalinya pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif Covid-19 di Indonesia. Namun, Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyebutkan virus corona jenis SARS-CoV-2 sebagai penyebab Covid-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal Januari. Hanya saja, identifikasi kasus pertama pada awal Maret itu sudah merupakan transmisi lokal dan bukan penularan kasus impor. Masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Sejak Januari saat virus corona jenis baru ini diumumkan dapat menular antar manusia, dan sudah menjajah di berbagai negara lain selain Wuhan di China. Pemerintah Indonesia tidak lantas langsung menutup akses penerbangan langsung dari dan ke Wuhan, yang ada di sekitar enam bandara.

Menilik ke belakang, rentetan awal munculnya Covid-19 sudah tidak asing di telinga masyarakat dunia. China tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus Covid-19 di dunia. Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada pengujung tahun 2019 itu, kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)

di China mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di Pasar Ikan Huanan.

b. Penularan virus corona

Ada beberapa cara penularan virus corona dari manusia ke manusia lainnya :

- a) Transmisi dari cairan: air dapat membawa virus dari pasien ke orang lain yang berada dalam jarak sekitar satu meter. Air yang dimaksud biasanya berupa cairan tubuh yang keluar saat berbicara, batuk, bersin, maupun yang lainnya.
- b) Transmisi dari udara : virus corona dapat menyebar melalui udara dalam jarakjauh. Cara penularan hampir sama dengan cara virus flu, SARS, variola yang menular dari satu orang ke orang lainnya.
- c) Transmisi kontak : virus dapat menular melalui kontak langsung dengan kulit atau selaput lendir. Ini juga bisa terjadi melalui darah yang masuk ke tubuh atau mengenai selaput lendir.
- d) Transmisi dari hewan : orang yang menjual, dan mendistribusikan hewan liar yang membawa virus corona dapat tertular melalui kontak tersebut.
- e) Kontak dekat dengan pasien : keluarga orang yang tinggal serumah, petugas medis bahkan orang yang sempat berada dekat dengan pasien rentan untuk tertular dengan virus ini.

c. Gejala Virus Corona Pada Manusia dari Hari ke Hari

Virus ini bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari, masa inkubasi corona paling pendek berlangsung selama dua sampai tiga hari. Sedangkan paling lamabisa mencapai 10 hingga 12 hari. Ini adalah rentang waktu yang dibutuhkan oleh virus untuk menjangkit dan menampakkan gejala-gejala awal. Dalam masa ini virus coronasulit untuk dideteksi. Virus corona sangat sensitif terhadap panas dengan suhu tidaknya 56 derajat celcius selama 30 menit. Virus corona belum bisa diobatidengan penanganan medis apa pun. Walau demikian, sebenarnya virus corona yang masuk ke dalam tubuh manusia bisa mati dalam rentang waktu 5-7 hari. Dengan sistem imun tubuh yang cukup baik, virus corona tak mudah menyebar ke seluruh anggota tubuh.

Dampak yang ditimbulkan dari Covid-19 banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari munculnya penyakit corona ini. Tidak hanya di Indonesia saja melainkan di seluruh dunia

merasakan dampaknya. Pandemi virus corona yang menyebabkan Covid-19 semakin memberi pukulan kerasterhadap ekonomi global. Banyak sekali pabrik serta sektor lain mengalami kesulitan karena wabah ini. Dampak yang ditimbulkan dan untuk mencegah penyebaran virus ini pemerintah menutup semua aktivitas diluar ruangan. Selain itu bagi yang ingin bepergian harus menggunakan alat perlindungan diri seperti masker.

Pemerintah juga memberlakukan langkah pembatasan sosial atau social distancing dalam meredam dampak dari kebijakan yang telah diberlakukan, Pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah insentif demi menjaga daya beli masyarakat. Dan menurut saya ini adalah langkah yang baik. Dan lebih baik pemerintah fokus serta konsentrasi untuk menghentikan penyebaran corona. Pemerintah juga memberikan bantuan antara lain penambahan PKH, kartu sembako, peningkatan kartu pra kerja, pembebasan biaya listrik, insentif perumahan, pajak dll.

d. Cara Mencegah Virus Corona

Ini adalah mata rantai untuk memutuskan penyebaran virus corona. Selama mobilitas mereka masih tinggi akan kesulitan menghentikan corona. Mereka harus disubsidi agar tetap tinggal di rumah tetapi di supply kebutuhannya. Ada daerah yang bersih keras untuk memberlakukan lockdown agar tidak terjadi penyebaran virus. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran. Masyarakat dihimbau untuk selalu stay home (tinggal di rumah), bagi para pelajar atau pekerjayang diluar kota juga dilarang untuk kembali ke kampung halaman karena untuk menghindari virus ini. Setiap orang selalu diperiksa suhu tubuhnya, dan bagi yang baru pulang dari luar kota akan diisolasi selama 14 hari tidak boleh kemana-mana. Kita juga melakukan ibadah di rumah karena untuk menghindari kerumunan dari masyarakat.

Dengan adanya virus ini ada pula masyarakat yang bosan akan terus tinggal di rumah. Tetapi kita harus selalu berpikir positif karena adanya virus ini kita lebih sering di rumah dan dekat dengan keluarga dan saling perhatian antar sesama. Dan demi kesehatan bersama kita patuh taat akan semua peraturan yang diterapkan pemerintah.

Langkah-langkah meningkatkan kesadaran masyarakat agar terhindar dari Covid-19 di tinjau dari nilai moral banyak sekali langkah-langkah dan usaha untuk mencegah penularan virus ini agar tidak menyebar atau terjangkit seperti : Rajin mencuci tangan mencuci tangan adalah pangkal dari kebersihan dan kesehatan. Tangan adalah sumber kuman dan bakteri yang dapat menyebabkan beragam penyakit. Cuci tangan minimal 20 detik dengan menggunakan sabun

dan air mengalir. Ini merupakan langkah yang efektif membunuh kuman dan bakteri, termasuk virus corona. Cuci tangan mencegah penyebaran virus corona yang sangat direkomendasikan, termasuk oleh Badan Kesehatan Dunia.

Kenakan masker walaupun virus corona tidak menular melalui udara, upayakan menggunakan masker saat pergi atau keluar dari rumah agar terlindungi. Jika kamu dalam kondisi kesehatan kurang baik, maka upayakan untuk menggunakan masker medis yang memiliki ketebalan 3 lapis.

Hindari bersentuhan berpelukan, dan berjabat tangan adalah hal yang harus dihindari. Dengan menghindari kontak kulit maka tak ada kemungkinan perpindahan virus dan kuman yang terjadi. Jangan sentuh area wajah. Virus corona dapat menyerang tubuh lewat area segitiga wajah seperti mulut, mata, dan hidung. Jadi hindari untuk menyentuhnya agar tidak ada kemungkinan masuknya virus corona ke tubuh.

Etika bersin dan batuk Saat bersin dan batuk, tutup dengan tisu atau lipatan tangan agar virus tidak menyebar ke orang lain. Jangan lupa untuk segera mencuci tangan setelahnya. Hindari berbagi barang pribadi bukan pelit, tapi ini demi kesehatan bersama. Harus diingat jika virus corona dapat bertahan pada permukaan hingga 3 hari. Oleh karena itu usahakan untuk menggunakan barang pribadi dan tidak memakainya secara bergantian.

Bersihkan perabot rumah Selain kebersihan tubuh kita juga harus menjaga kebersihan sekitar kita. Jangan lupa untuk menggunakan cairan desinfektan untuk membersihkannya secara teratur sehingga tak ada kuman dan virus penyebab penyakit yang bersarang di rumah. Physical Distancing hindari kerumunan dan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.

Langkah ini bisa diterapkan saat berada ditempat umum atau luar ruangan sehingga tidak terpapar virus corona. Selalu mencuci bahan makanan. Jangan lupa untuk selalu mencuci bahan makanan yang akan kita masak atau kita makan. Bersihkan dengan larutan hidrogen peroksida atau cuka putih yang sangat aman digunakan untuk makanan.

5. Hasil Penelitian Yang Relevan

Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema , yakni sebagai berikut, "Efektifitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di masa pandemik covid-19 di kecamatan sinjai utara kabupaten sinjai."

Di akhir tahun 2019, dunia diguncang oleh suatu wabah virus yang menyebabkan kematian secara massal. Wabah virus ini disebut dengan virus Covid-19 atau coronavirus disease 2019 adalah virus baru yang berasal dari virus severe acute respiratory syndrome coronavirus 2

(SARS-CoV-2). Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kematian massal, namun juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pada ekonomi, pandemi ini menyebabkan turunnya aktivitas perekonomian yang dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Wabah berdampak pada banyak sektor usaha sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menurunnya penyerapan tenaga kerja karena banyak sektor usaha yang berhenti. Pandemi Covid-19 menekan semua elemen perekonomian, salah satunya perekonomian desa. Perpindahan penduduk desa ke kota yang dilarang oleh pemerintah agar menghentikan perluasan virus covid-19 ini menyebabkan penduduk desa yang akan mencari lapangan pekerjaan ke kota kesulitan untuk menyesuaikan diri.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 32 menjelaskan bahwa penggunaan dana desa di tahun 2020 karena terdampak pandemi covid-19 diutamakan untuk Bantuan Langsung Tunai sebagai bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi Covid-19.

Sebagai masyarakat yang memiliki tatanan pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam bertindak hukum. Desa memiliki kewenangan dalam bertindak membentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan teritorial dan kondisi masyarakatnya sebagai jembatan dalam membantu fungsi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pengawasan pemerintah desa dengan masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan suatu desa. Lembaga kemasyarakatan desa terdiri dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, Karang Taruna, Remaja masjid, Dasa Wisma, PKK, LPMD atau LPMK, Lembaga adat, serta Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup dan kualitas masyarakatnya, serta bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar pembangunan masyarakat, melalui sarana prasarana, melalui sumber daya alam yang terdapat dalam desa tersebut, membangun gerak perekonomian lokal sesuai dengan sumber daya alam yang ada dan sesuai dengan kemampuan masyarakatnya, serta pembangunan berwawasan lingkungan secara berkelanjutan. Proses pembangunan masyarakat suatu desa dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MPPD). Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa mengutamakan skala prioritas, program, kebutuhan, kegiatan, dan tujuan pembangunan suatu desa yang

didanai oleh Anggaran Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah setempat berdasarkan pengajuan kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan terbaik antara input dan output, atau sering disebut rasio input dan output. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud pembangunan alternatif yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipasi yang memberi kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Desa juga merupakan basis kekuatan sosial ekonomi, politik yang perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Sebagai salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat adalah dengan adanya alokasi dana desa oleh pemerintah sebagaimana yang telah dituangkan pada Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Oleh karena itu, Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 yang didalamnya memuat adanya dana alokasi desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dengan mengembangkan ekonomi dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, dengan metode observasi, wawancara serta dokumentasi.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) meliputi: (a) Memelihara kerukunan hidup warga masyarakat; (b) Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa; (c) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; (d) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; (e) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat; (f) Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Dalam meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat untuk berkembang, pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan

martabatnya untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik itu di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.

Maka pembangunan itu merupakan proses yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan guna mewujudkan hal yang lebih baik seiring dengan dimensi waktu. Pada kenyataannya banyak program-program pembangunan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dikarenakan pemerintah belum mengoptimalkan peranan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Berdasarkan pernyataan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bahwa belum meratanya pertumbuhan ekonomi karena adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur, ketimpangan kualitas SDM, dan ketimpangan sumber energi yang masih terpusat. Tidak meratanya pembangunan akan berdampak pada tingkat kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 dibagi menjadi dua yaitu, angka kemiskinan penduduk di kota sebesar 8.60% sedangkan angka kemiskinan penduduk di pedesaan sebesar 14.70%. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa.

Menurut Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Berdasarkan pendapat ahli di atas, maka pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh masyarakat suatu bangsa.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka pembangunan nasional dan pembangunan daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bisa menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan yang bisa dilakukan di daerah pedesaan adalah dengan memberdayakan masyarakat serta pengembangan ekonomi masyarakat. Pembangunan melalui pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat sangat efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, terutama dengan memunculkan potensi ekonomi berbasis masyarakat. Potensi ekonomi saat ini sangat menjadi incaran suatu daerah untuk dapat membangun dan membangkitkan partisipatif masyarakat. Dukungan pemerintah terhadap peningkatan ekonomi di masyarakat desa pun sudah diwujudkan dalam implementasinya hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan desentralisasi birokrasi yang mengalami perubahan yang cukup baik agar

kebijakan-kebijakan yang dibuat akan cepat tersalurkan dan membantu mengurangi masalah-masalah yang ada.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dibuat untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Dimasa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bermakna bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan konteks alamiah dengan tujuan untuk mengartikan apa yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada. Penelitian ini sering disebut dengan penelitian lapangan yang mana bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data dari adanya Proses Pelaksanaan bantuan sosial dari pemerintah bagi masyarakat yang terdampak Covid-19, Sumber data dalam penelitian berasal dari data primer dan sekunder.

Penelitian ini dilakukan akibat adanya fenomena wabah Covid-19 yang terjadi diseluruh negara termasuk Indonesia. Yang menyebabkan pengaruh signifikan di berbagai sektor, termasuk sektor perekonomian. Hal tersebut menyebabkan Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban dimasyarakat, yaitu dengan memberikan bantuan sosial. Urgensi penelitian ini sebagai ukuran keefektivan program bantuan sosial di masa pandemi Covid-19 agar menjadi bahan evaluasi untuk dapat mengcover bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

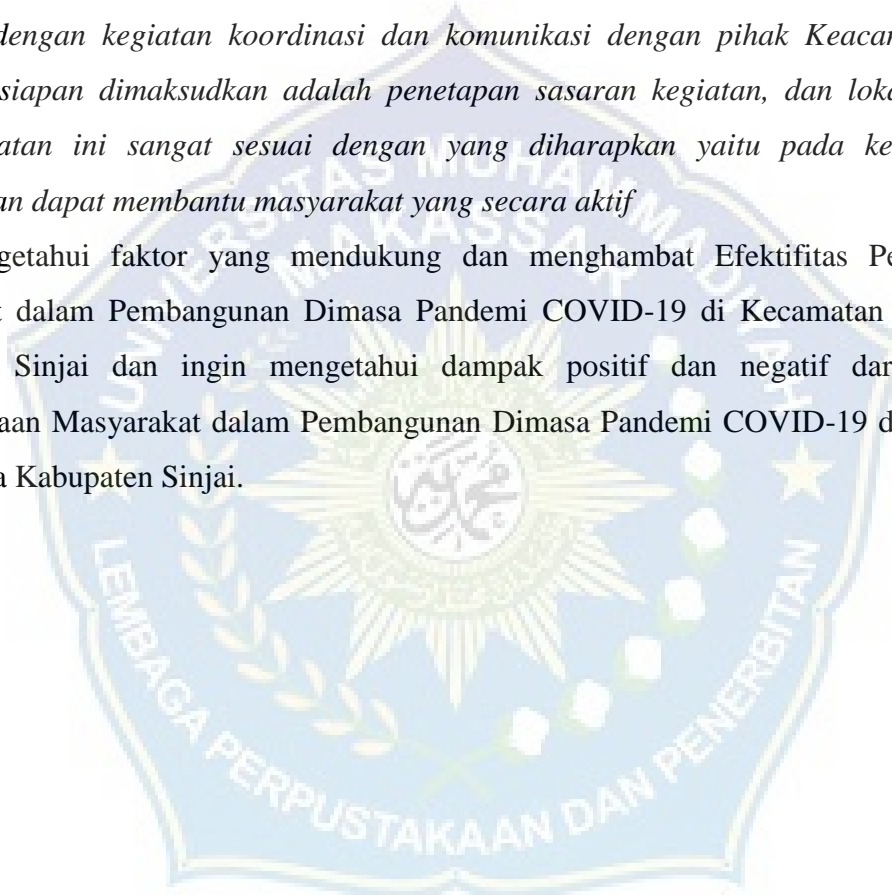
Efektivitas diartikan sebagai suatu ukuran yang dapat menggambarkan sejauh mana target dapat tercapai. keefektivan suatu program dapat diamati dari indikator-indikator berupa ketepatan penentuan pilihan, waktu, tujuan dan sasaran. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas perlu dilakukan karena nantinya akan terlihat seberapa efektif bansos tersebut dalam memberikan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat selama pandemi Covid-19 ini masih ada

Pemerintah membentuk program bantuan selama Covid-19 mempunyai tujuan yang ingin diraih seperti yang telah dijelaskan diatas. Untuk melihat indikator tercapainya tujuan dari program bansos tersebut dalam membantu masyarakat rentan yang terdampak Covid-19 dapat diukur melalui efektivitas pelaksanaan program bansos tersebut. Pengukuran dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara rancangan yang sudah ditetapkan dengan hasil nyata

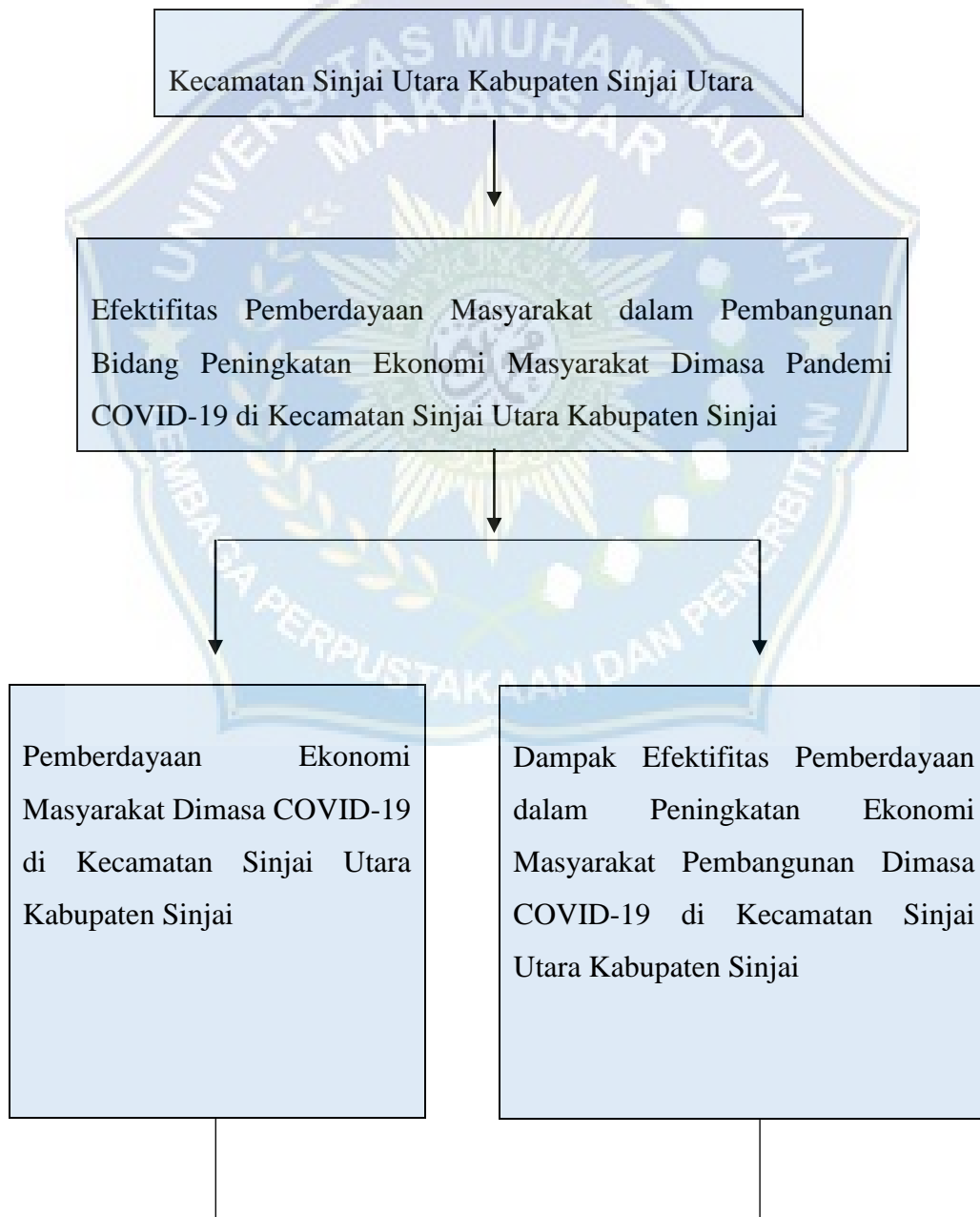
yang telah diwujudkan. Tindakan yang dilakukan harus tepat karena tujuan tidak akan tercapai atau dengan kata lain bantuan tidak efektif jika tindakan tersebut tidak tepat.

Munculnya wabah penyakit Corona Virus Diseases-19 (Covid-19) sangat memengaruhi kehidupan manusia. Pemberdayaan masyarakat terdampak covid-19 di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dengan cara mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa. Hal ini dilakukan guna memberdayakan masyarakat dalam menciptakan pendapatan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi dari masyarakat tersebut agar mereka tidak selalu bergantung dari bantuan pemerintah. Masyarakat perlu mengetahui betapa pentingnya untuk tetap berwirausaha dalam masa pandemi ini. Tahapan kegiatan dirancang selama 1 minggu yang didahului dengan kegiatan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Kecamatan Sinjai Utara. Persiapan dimaksudkan adalah penetapan sasaran kegiatan, dan lokasi kegiatan. Hasil kegiatan ini sangat sesuai dengan yang diharapkan yaitu pada kegiatan yang dilaksanakan dapat membantu masyarakat yang secara aktif

Ingin mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Dimasa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai dan ingin mengetahui dampak positif dan negatif dari Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Dimasa Pandemi COVID-19 di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.



Kerangka Pikir (Conceptual Homework)



Terwujudnya Kebutuhan Ekonomi Masyarakat Dimasa
COVID-19 di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yakni peneliti terlibat langsung dalam proses dan kegiatan dilapangan serta memusatkan data dan perhatian pada kejadian hidup yang dialami oleh objek penelitian. Peneliti akan mencoba menggunakan sudut pandang yang lain sehingga dapat memahami pola pikir kehidupannya. Fenomenologi tidak hanya memungkinkan peneliti untuk melihat objek penelitian hanya dari prespektif partisipan saja, namun juga memahami kerangka yang telah dikembangkan setiap orang dan dari waktu ke waktu hingga memiliki tanggapan sendiri terhadap peristiwa dan pengalamannya.

Sumber data primer yang diperoleh langsung dari perangkat desa serta tokoh masyarakat dan pemuda-pemuda Karang Taruna yang berpengaruh pada kegiatan dan program-program memberdayakan masyarakat desa dalam mengelola dana desa. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumentasi pelaksanaan program seperti buku-buku, artikel, surat kabar, maupun foto dokumentasi kegiatan. Data sekunder ini merupakan bukti pendukung yang memperkuat penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi yang diawali dengan wawancara lalu diperdalam dengan observasi dan dibuktikan dengan dokumentasi. Jenis penelitian kualitatif menjadikan peneliti instrument utama (key instrument) sehingga terjun langsung ke lapangan guna wawancara, observasi dan dokumentasi.

Peneliti melakukan teknik analisis (triangle) dengan kegiatan mencari dan menyusun data dari hasil wawancara, mencatat kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat dilapangan serta mengumpulkan bukti dokumentasi kegiatan. Teknik analisis ini mengorganisasi data dalam beberapa kategori lalu menjabarkannya ke dalam poin-poin penting dan menarik kesimpulan yang tepat dan mudah dipahami sehingga dapat dilaporkan kepada orang lain yang membacanya. Ada tiga tahapan teknik analisis, yaitu reduksi data yang berarti merangkum, memilih, dan memfokuskan hal-hal penting yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai topik dan tema penelitian. Kedua, penyajian data yang bersifat naratif sesuai dengan hasil dari pengumpulan data. Ketiga, penarikan kesimpulan yang merupakan akhir temuan penelitian. Semua hasil temuan di abstraksikan ke dalam proposisi-proposisi yang lebih kompleks.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Karena mengingat bahwa Kecamatan Sinjai Utara masih belum efektif dalam pelaksanaan program usaha pemberdayaan masyarakat dimasa pandemi COVID-19. Sehingga diperlukan perhatian pemerintah agar program ini dapat memberi peranan secara langsung kepada masyarakat untuk menjadi individu yang mandiri yang menyangkut kelangsungan hidup masyarakat. Sebagian utama pelaksanaan penelitian ini yaitu terhadap kepala desa tepatnya dikelurahan Bongki RT/RW 01 & akan dilakukan diwaktu 07.00-11.00 WIB.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut . Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat .Dana Desa tersebut terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.Prioritas tersebut diharapkan agar desa memiliki arah dan pandangan mengenai pemanfaatan Dana Desa

C. Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini, maka dalam pelaksanaannya data dan informasi yang diperoleh akan dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Sumber Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau diperoleh langsung dari survey lapangan. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik snowball sampling. Teknik snowball sampling adalah penentuan sampel yang mula mula jumlahnya kecil menjadi membesar seperti bola salju yang menggelinding yang lama lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel pertama tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dianggap lebih tahu dan dapat memberikatan data yang lebih lengkap. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak.

Data primer adalah data yang bersumber secara langsung dari sumber data. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh secara langsung dari masyarakat berbagai latar belakang seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan berbagai elemen masyarakat lainnya.

- b) Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal maupun skripsi yang berhubungan dengan efektivitas pemberdayaan masyarakat.

D. Instrumen Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini maka digunakan instrumen dan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Kuesioner; yaitu daftar pertanyaan berupa angket berstruktur dengan menggunakan skala pengukuran ordinal.
2. Interview (Wawancara), yaitu melakukan dialog atau tanya jawab langsung dengan para responden/informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu. Data hasil wawancara ini bersifat melengkapi data hasil kuesioner.

Informan adalah orang-orang yang akan menjadi sumber informasi dalam penelitian ini di antaranya 10 orang yang terdiri dari

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 1. Pemerintah Desa/Kepala desa | : 1 orang |
| 2. Sekertaris Desa | : 1 orang |
| 3. Kaur Umum | : 1 orang |
| 4. Badan Permusyawaratan Desa | : 1 orang |
| 5. Kepala Jaga | : 2 orang |
| 6. Meweteng | : 1 orang |
| 7. Masyarakat` | : 3 orang |

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, teknik yang digunakan dalam penelitian ini antar lain:

- a. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis. pola perilaku subjek (orang) , objek (benda-benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu- individu yang diteliti. Pada pengamatan ini tahapan yang

dilakukan meliputi pengalaman secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, setelah itu dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, kemudian dilakukan pembatasan objek pengamatan dan dilakukan pencatatan.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti berkenalan dengan pelaku manusia, proses kerja, gejala - gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu benar. Dalam dengan pelaku manusia, proses kerja, gejala - gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu benar.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶ Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana pertanyaan telah dirumuskan dengan cermat sehingga peneliti dapat memperoleh data secara tepat dan pasti sesuai informasi yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara kepada pengurus BUMdes, masyarakat desa dan kepada aparatur desa untuk mengetahui efektifitas BUMdes yang selama ini sudah berjalan.

Wawancara (interview) adalah salah satu keadaan mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial . Metode interview atau wawancara alat pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisa pula. Wawancara dalam penelitian survey dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan judul peneliti. Adapun Jenis interview (wawancara) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu suatu pelaksanaan interview pada saat melaksanakan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen, penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis yang alternatif jawabanya sudah disiapkan. Sehingga wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan dan pengumpulan data mencatatnya.

c. Dokumen

Dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Disamping memperoleh dari keterangan-keterangan dari responden melalui wawancara, penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan ADD.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumen dari seseorang. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data tulis atau dokumen resmi tertulis serta foto dengan pihak terkait. Pihak terkait antara lain Kepala Desa atau PJ pekon serta aparat desa.

F. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Data tersebut dianalisis dengan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah suatu cara berfikir yang berawal dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta tersebut ditarik kesimpulan.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun temuan penelitian secara sistematis dari hasil wawancara, dokumentasi dan data – data di lapangan. Hasil dari temuan penelitian tersebut dapat ditafsirkan lebih dalam untuk menemukan makna sehingga dapat ditarik kesimpulan sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat dipahami. Dalam menganalisa data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian terhadap suatu obyek pada masa sekarang dan penuturan, menganalisis, dan mengklarifikasikan data yang diperoleh untuk interpretasi secara tepat.

Alasan peneliti menggunakan metode deskriptif antara lain:

- 1) Pemaparan dalam metode deskriptif memungkinkan penulis dapat menemukan dan memecahkan permasalahan.
- 2) Pemaparan metode deskriptif dapat menjadikan pedoman bagi penulis untuk menafsirkan data.
- 3) Pelaksanaan metode tidak terbatas pada pengumpulan data sehingga memungkinkan penulis untuk menganalisis dan menginterpretasi data, begitu seluruh data yang diperoleh telah selesai dikumpulkan semuanya dianalisis lebih lanjut secara intensif.

Metode deduktif adalah cara berfikir yang berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan umum, fakta-fakta yang umum, fakta-fakta yang unik dan merangkai kata-kata yang umum itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat khusus.

- a. Reduksi data (data reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu, peneliti harus melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data (data reduction) Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu, peneliti harus melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyaji dan data (data display)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyaji dan data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun, dalam pola hubungan, sehingga akan lebih mudah dipahami

c. Kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada tahap awal, didukung oleh bukti - bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1) Letak Geografis Kabupaten Sinjai

Kabupaten Sinjai adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan ibu kota kabupaten ini adalah Balangnipa dan memiliki motto Sinjai Bersatu motto ini memiliki makna harapan dan tekad serta keinginan untuk membangun dan mempertahankan kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Kabupaten Sinjai terletak di pantai timur Provinsi Sulawesi Selatan jarak Kabupaten Sinjai sekitar kurang lebih 220 km dari Kota Makassar kabupaten ini memiliki luas wilayah 819,96 Km².

Secara geografis Kabupaten Sinjai berada di titik Koordinat 502'56''-5021'16'' Lintang Selatan dan antara 1190 56 '30''- 120025'33'' Bujur Timur. Terdiri atas daratan rendah di Kecamatan Sinjai Utara, Tellu Limpoe, dan Sinjai Timur selanjutnya daerah dataran tinggi dimulai dari Sinjai Barat Sinjai Tengah, Sinjai Selatan dan Sinjai Borong sedangkan Kecamatan terunik adalah Kecamatan Pulau Sembilan merupakan hamparan 9 Pulau yang berderet. Posisi kabupaten Sinjai berbatasan dengan beberapa kabupaten, yaitu :

- a) Kabupaten Bone di bagian Utara
- b) Teluk Bone di bagian Timur
- c) Kabupaten Bulukumba di bagian Selatan
- d) Kabupaten Gowa di bagian barat Tabel

Tabel 5. Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Sinjai

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	Persentase (%)
1.	Sinjai Barat	135,53	16,52916,529
2.	Sinjai Borong	66,97	8,167
3.	Sinjai Selatan	131,99	16,097
4.	Tellu Limpoe	147,30	17,964
5.	Sinjai Timur	71,88	8,766
6.	Sinjai Tengah	129,70	15,818
7.	Sinjai Utara	29,57	3,606
8.	Bulupoddo	99,47	12,131
9.	Pulau Sembilan	7,55	0,920

	Kabupaten Sinjai	Sinjai 819,96	100
--	-------------------------	----------------------	------------

Gambar Kabupaten Sinjai



2) Topografi dan Kemiringan Lereng

a. Kabupaten Sinjai

Menurut data pusat statistik Kabupaten Sinjai tentang topografi dan kemiringan lereng di Kabupaten Sinjai bervariasi, sebagian besar wilayah kabupaten Sinjai (45.530 hektar, 55,5 %) berada pada ketinggian antara 100- 500 mdpl kemudian berada pada ketinggian 500-1000 mdpl (17.370 hektar, 21,2%) 25-100 mdpl (7.980 hektar, 9,7%) diatas 1000 mdpl (6.570 hektar, 8,0%) dan dibawah 25 mdpl (4.540 hektar, 5,5%) ketinggian wilayah Kabupaten Sinjai dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Ketinggian Wilayah Kabupaten Sinjai

No	Ketinggian (Mdpl)	Luas	
		%	Ha
1.	0 – 25	5,5	4.540
2.	25 – 100	9,7	7.980
3.	100 – 500	55,5	45. 530
4.	500 – 1000	21,2	17.370
5.	> 1000	8,0	6.570
	Jumlah	100	819,96

Kemiringan lereng Kabupaten Sinjai menggambarkan bentuk kedudukan tanah terhadap bidang datar dinyatakan terhadap persen (%). Pembagian wilayah topografi di

Kabupaten sinjai berdasarkan kemiringan lereng di bagi kedalam empat bagian menurut badan pusat statistik Kabupaten Sinjai sebagai berikut.

- a) Rata 0-8
- b) Landai sampai bergelombang 8-15%
- c) Bergelombang sampai bergunung 15 – 40%
- d) Bergunung sampai jurang > 40%

b. **Kelurahan Bongki**

Kelurahan Bongki terletak di ujung Utara kabupaten Sinjai, berbatasan langsung dengan kabupaten Bone dan merupakan salah satu dari enam kelurahan di kecamatan Sinjai Utara dengan jarak tempuh dari Ibu kota kecamatan adalah 1 km, dari Ibu kota kabupaten Sinjai adalah 4,5 km dan dari Ibu kota Provinsi adalah 230.

Kelurahan Bongki merupakan kategori kelurahan swakarya yang pada awal berdiri terdiri atas 2 lingkungan yaitu lingkungan Paruntu dan lingkungan Benteng. Pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Camat Sinjai Utara No. 01/I/2002/SUT Tanggal 7 Januari 2002 telah ditetapkan pemekaran lingkungan kelurahan Bongki menjadi 4 lingkungan yaitu:

- 1) Lingkungan Paruntu dimekarkan menjadi lingkungan Paruntu dan lingkungan Popanda.
- 2) Lingkungan Benteng dimekarkan menjadi lingkungan Benteng dan lingkungan Samaenre.

Kelurahan Bongki merupakan daerah dataran dan kawasan bebas banjir dengan ketinggian dari permukaan laut ± 71 m. Suhu udara rata-rata 29-30o C. Adapun batas- batasnya adalah sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Bone, sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Balangnipa, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Biringere dan sebelah barat berbatasan dengan kelurahan Lamatti Rilau. Dengan luas wilayah sekitar ± 4.81 Km², terdiri: luas persawahan ± 114 Ha, tanah kering ± 367 Ha, luas permukiman 28. 05 Ha, luas perkebunan 62 Ha, luas pekarangan ± 52 Ha, tanah perkuburan ± 52 Ha dan lainnya : ± 188 Ha.

3) Visi & Misi

A. **Visi**

Mewujudkan good local govenruance untuk menciptakan pelayanan prima pada masyarakat.

B. Misi

- a) Mewujudkan pelayanan public yang prima di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kelurahan Bongki kecamatan Sinjai Utara.
- b) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan yang terampil dan profesional dalam menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c) Meningkatkan resfonsifitas masyarakat terhadap pelayanan public dan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Sinjai.
- d) Meningkatkan kualitas pelayanan umum terpadu terhadap masyarakat melalui intensitas pengkoordinasian dan pengembangan, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial.

4) **Keadaan Penduduk**

Dengan jumlah penduduk 8.989 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 4.049 jiwa dan perempuan 4.940 jiwa. Masyarakat kelurahan Bongki bermata pencaharian yang berbeda-beda yaitu:

1. Karyawan yaitu PNS sebanyak 669 orang, ABRI sebanyak 24 orang dan swasta sebanyak 75 orang.
2. Wiraswasta/ pedagang sebanyak 1.583 orang.
3. Tani sebanyak 248 orang.
4. Pertukangan sebanyak 14 orang.
5. Buruh Tani sebanyak 11 orang.
6. Pensiunan sebanyak 135 orang.
7. Nelayan sebanyak 16 orang.
8. Pemulung sebanyak 17 orang

5) **Keadaan Ekonomi**

Jumlah penduduk miskin menurut data standar BPS adalah 109 KK. Anggaran Kelurahan dari dana APBD kabupaten/kota sebesar Rp.391.906.732.00. PDRB per kapita kabupaten sinjai mengalami peningkatan 9,85 persen dibanding tahun sebelumnya. PDRB per kapita berturut-turut dalam periode 2022 sebesar 21,13 juta, 23,85 juta, 27,42 juta, 31,57 juta dan 34,68 juta. Ditengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian kabupaten Sinjai periode 2022 dapat tumbuh di atas 5%, yakni sebesar 7,60%, 7,32%, 6,98%, 7,54% dan 7,16%. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi maupun sisi permintaan akhir. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi

kabupaten Sinjai didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang menyumbang lebih dari 45% total PDRB setiap tahunnya. Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumahtangga (PK-RT), yang menyumbang lebih dari separuh total PDRB.

6) Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dan prasarana kelurahan Bongki dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini:

Sarana dan Prasarana	Jumlah
Kantor kelurahan	1
Puskesmas	1
Posyandu	9
Gedung sekolah PAUD	4
Gedung sekolah TK	4
Gedung sekolah SD	3
Gedung sekolah SLTP	2
Masjid	18
Mushollah	2
Lapangan olahraga	2
Balai pertemuan	1

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kantor kelurahan terdiri atas satu yang sifatnya permanen yang digunakan dalam melayani masyarakat, sementara di kelurahan Bongki ini terdiri atas beberapa gedung sekolah yang memudahkan masyarakat dalam memilih sekolah yang terbaik. Selain itu masjid yang berjumlah 18 buah yang memudahkan masyarakat melaksanakan ibadah.

B. Deskripsi Karakteristik Responden

Berikut akan disajikan deskripsi data responden berdasarkan karakteristiknya.

a) Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase%
1	Laki-laki	45	75%
2	Perempuan	15	25%
3	Jumlah	34	100%

Berdasarkan tabel diketahui bahwa jumlah laki-laki yang menjadi responden penelitian ini adalah 45 orang atau sebesar 75%, sedangkan jumlah perempuan yang menjadi responden penelitian ini adalah 15 orang atau 25%. Hal ini menunjukkan yang menjadi responden paling banyak adalah laki-laki.

b) Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

No	Umur	Frekuensi	Persentase%
1	35-38 Tahun	8	13,3
2	39-42 Tahun	23	38,3
3	43-46 Tahun	4	6,7
4	>46 Tahun	25	41,7
5	Jumlah	60	100

Berdasarkan tabel diketahui bahwa dari 60 responden sebanyak 8 orang atau 13.3% berusia 35-38 tahun, kemudian sebanyak 23 orang atau 38.3% berusia 39- 42 tahun, kemudian sebanyak 4 orang atau 6.7% berusia 43-46 tahun, dan sebanyak 25 orang atay 41.7% berusia > 46 tahun.

c) Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase%
1	SMA	9	15,0
2	D3	4	6,7
3	S1	38	63,3
4	S2	9	15,0
5	Jumlah	60	100

Berdasarkan tabel diketahui bahwa 9 orang atau 15,0% responden tamatan SMA, kemudian 4 orang atau 6,7% tamatan D3, kemudian 38 orang atau 63,3% responden tamatan S1 dan 9 orang atau 15% responden tamatan S2.

d) Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

No	Penghasilan	Frekuensi	Persentase%
1	<Rp.3.000.000,00	1	1,7
2	Rp.3.000.000,00-Rp.	29	48,3
3	5.000.000,00		

4	>Rp.5.000.000,00	30	50
5	Jumlah	60	100

Berdasarkan tabel diketahui bahwa 1 orang atau 1.7 % responden memiliki penghasilan <Rp.3.000.000,00, sedangkan 29 orang atau 48.3% responden memiliki penghasilan Rp.3.000.000,00-Rp. 5.000.000,00, dan 30 orang atau 50% responden memiliki penghasilan >Rp.5.000.000,00.

C. Hasil Penelitian

Berikut Hasil Penelitian. Kegiatan Pembangunan Sarana & Prasarana ,Kelurahan & Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tahun Anggaran 2022 Kelurahan Bongki.

1) Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan

Pembangunan Sarana & Prasarana Kelurahan	Volume	Satuan	Anggaran	Lokasi
Lanjutan Pemasangan Paving Blok Jl. Gunung Latimojong Lingkungan Popanda	100	M2	106.339.370.00	Lingkungan Popanda
Lanjutan Rabat Beton Jl. Baso Patekkai Lingkungan Benteng	100	M2	106.339.370.00	Lingkungan Benteng
Pembuatan Jalan Setapak Mesjid Nurul Imam Jalan Melingkar Jln Pettaponggawae Lingkungan Samaenre.	51	M2	54.233.079.00	Lingkungan Samaenre
Pembuatan Jalan Lingkungan Jl. Sawerigading Lorong.	588	M2	115.909.913.00	Lingkungan Paruntu
ATK	1	Ls	6.485.000.00	
Kertas Cover	1	Ls	1.148.000.00	
Bahan Komputer	1	Ls	1.452.000.00	

2) Pemberdayaan Masyarakat

No	Pemberdayaan Masyarakat	Volume	Satuan	Anggaran	Lokasi
1	Bahan bakar & pelumas	287	Liter	2.257.500,000	
2	Belanja bahan-bahan lainnya berupa face mask	50	Box	4.950.000.00	

	ear loop				
3	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor	1	Ls	2.039.000.00	
4	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas & cover	1	Ls	3.028.000.00	
5	Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak	2	Ls	14.814.000.00	
6	Bahan kegiatan kantor bahan komputer	1	Ls	1.137.760.00	
7	Belanja natura dan pakan natura bongki	1	Ls	60.750.000.00	
8	Belanja makanan dan minuman rapat	1	Ls	20.000.000.00	
9	Belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan	1	Ls	111.600.000.00	
10	Honorarium Rohaniwan	1	Ls	1.800.000.00	
11	Belanja jasa tenaga kesehatan	1	Ls	72.000.000.00	
12	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2	Ls	74.400.000.00	
13	Belanja Hibah	2	Ls	19.934.000.00	
14	Jumlah			388.710.260.00	

3) Uji Kualitas Data

a. Uji Validitas Instrumen Penelitian Uji

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui ketepatan dan kelayakan setiap butir angket yang diajukan sehingga suatu variabel dapat diidentifikasi. Alat ukur yang dapat digunakan dalam pengujian validitas suatu angket atau kuesioner

adalah angka hasil korelasi antara skor angket dengan skor keseluruhan responden terhadap informasi dalam kuesioner.

b. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk melihat kestabilan dan konsistensi dari responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang disusun dalam suatu bentuk angket. Hasil uji ini akan mencerminkan dapat atau tidaknya suatu instrumen penelitian dipercaya, berdasarkan tingkat ketepatan dan kemantapan suatu alat ukur. Standar yang digunakan dalam menentukan reliabel atau tidaknya suatu instrumen penelitian.

4) Partisipasi Pikiran/Ide Mengajak

Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam proyek pembangunan sarana lingkungan permukiman bukanlah hal mudah. Hal ini karena, masyarakat selalu beranggapan bahwa proyek-proyek yang dilakukan oleh pemerintah merupakan proyek yang pada dasarnya mempunyai anggaran yang cukup untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Olehnya itu, setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan proyek-proyek itu harus mendapat upah. Hal ini wajar karena unsur partisipasi menurut Keith Davis salah satunya adalah keterlibatan mental dan perasaan, lebih dari pada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah.

5) Partisipasi Tenaga

Selain partisipasi dalam bentuk pemikiran, tenaga merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat kelurahan yang sangat potensial diarahkan dalam proses pembangunan kelurahan, khususnya dalam pengerjaan proyek-proyek fisik, berabagai pekerjaan dilakukan atas dasar gotong-rotong atau swadaya. Dengan dana yang terbatas, mereka mampu dan berhasil menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan fisik, misalnya rumah ibadah, balai kelurahan, bahkan sekolah dan lain sebagainya. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa mengarahkan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya tidak semata-mata tergantung pada aspek anggaran.

6) Partisipasi Barang Barang

Barang yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah barang-barang yang dimiliki oleh warga yang secara sukarela disumbangkan kepada desa dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek pembangunan sarana lingkungan permukiman. Olehnya itu, diharapkan kesediaan warga untuk dapat menyumbangkan bahan-bahan tertentu yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan, renovasi dan pemeliharaan sarana lingkungan permukiman tersebut. Himbuan ini ternyata mendapat sambutan positif dari beberapa warga dan tokoh masyarakat. Sambutan positif dimaksud adalah pemberian secara sukarela beberapa bahan (semen, pasir

dan lain-lain), beberapa makanan yang bisa di konsumsi bagi masyarakat yang turut terlibat dalam pengerjaan proyek.

7) **Partisipasi Uang**

Memiliki anggaran dana yang cukup yang dikelola dengan baik oleh Tim Pelaksana Kegiatannya dan juga berkat bantuan atau dalam artian partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangsi tenaga dan keahlian yang jika menggunakan pekerja sewa akan memakan biaya. Namun, ada beberapa warga yang tidak bisa memberikan sumbangsinya melalui pikiran dan tenaganya cenderung lebih memilih untuk berpartisipasi dalam bentuk uang. Biasanya, masyarakat seperti ini terkendala dalam hal waktu untuk berpartisipasi karena pertimbangan pekerjaan yang mereka geluti yang tidak memberikan cukup waktu untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk tenaga.

Beberapa hal yang menjadi parameter partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana lingkungan permukiman pada penelitian ini antara lain kesadaran dan kesediaan serta keterlibatan masyarakat. Sementara itu berdasarkan rumusan masalah penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana permukiman yaitu dengan melakukan pengklasifikasian bentuk keikutsertaan masyarakat dengan melakukan pengukuran terhadap tingkat partisipasi masyarakat yang diberikan berupa (1) uang, tenaga dan ide; (2) uang dan tenaga atau tenaga dan ide; (3) hanya uang, hanya tenaga dan hanya ide/pemikiran saja.

D. Pembahasan

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, teknik yang digunakan dalam penelitian ini antar lain:

a. Observasi

Observasi adalah proses pencatatan yang dilakukan secara sistematis. pola perilaku subjek (orang), objek (benda-benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Pada pengamatan ini tahapan yang dilakukan meliputi pengalaman secara umum mengenai hal-hal yang sekiranya ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, setelah itu dimulai dengan mengidentifikasi aspek-aspek yang menjadi pusat perhatian, kemudian dilakukan pembatasan objek pengamatan dan dilakukan pencatatan.

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, peneliti

berkenalan dengan pelaku manusia, proses kerja, gejala - gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu benar. Dalam dengan pelaku manusia, proses kerja, gejala - gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu benar.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶ Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur dimana pertanyaan telah dirumuskan dengan cermat sehingga peneliti dapat memperoleh data secara tepat dan pasti sesuai informasi yang dibutuhkan dengan melakukan wawancara kepada pengurus BUMdes, masyarakat desa dan kepada aparatur desa untuk mengetahui efektifitas BUMdes yang selama ini sudah berjalan.

Wawancara (interview) adalah salah satu keadaan mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial . Metode interview atau wawancara alat pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisa pula. Wawancara dalam penelitian survey dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan judul peneliti. Adapun Jenis interview (wawancara) yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu suatu pelaksanaan interview pada saat melaksanakan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrumen, penelitian berupa pertanyaan- pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya sudah disiapkan. Sehingga wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan dan pengumpulan data mencatatnya.

c. Dokumen

Dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Disamping memperoleh dari keterangan-keterangan dari responden melalui wawancara, penelitian ini menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pengelolaan ADD.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumen dari seseorang. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data tulis atau dokumen resmi tertulis serta foto dengan pihak terkait.

Pihak terkait antara lain Kepala Desa atau PJ pekon serta aparat desa.

efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana lingkungan permukiman menjadi hal yang perlu diperhatikan baik oleh masyarakat itu sendiri maupun pemerintah daerah dan pemerintah setempat. Partisipasi masyarakat itu sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang berada karena keadaan alam, kemampuan berpikir dan budaya hidupnya. Keterlibatannya juga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti faktor usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan dan lama tinggal.

a) Usia

Rendahnya partisipasi kelompok muda ini diduga disebabkan masih ada rasa sungkan terhadap para orang tua yang dianggap lebih tua. Responden usia muda, terutama wakil karang taruna jarang sekali ikut menghadiri undangan rapat Musrembangdes. Golongan tua dianggap lebih berpengalaman dan lebih banyak memberikan pendapat baik berupa masukan, saran dalam hal menetapkan keputusan.

b) Jenis Kelamin

Hal ini disebabkan oleh adanya system pelapisan sosial yang terbentuk dalam masyarakat, yang membedakan kedudukan dan derajat ini, akan menimbulkan perbedaan-perbedaan hak dan kewajiban antar laki-laki dan perempuan. Menurut Soedarto et.al (1992) dalam Yulianti (2012), bahwa di dalam sistem pelapisan atas dasar seksualitas ini, golongan pria memiliki hak istimewa dibandingkan golongan wanita. Dengan demikian maka kecenderungannya adalah kelompok laki-laki akan lebih banyak berpartisipasi.

c) Tingkat Penghasilan

Hal tersebut ditegaskan oleh beberapa responden yang di wawancara secara langsung pada saat penelitian. Sesuai penjelasan lurah Ince Muh.Ihlah Ismail S.E, Mengatakan:

kebanyakan apabila ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam bentuk uang kebanyakan dari masyarakat yang berpenghasilan lebih, atau dikatakan orang berada. Jika orang-orang yang berpenghasilan rendah lebih memilih menyumbangkan tenaga mereka guna pembangunan.

Menurut keterangan dari beberapa responden, semakin tinggi penghasilan seseorang maka memungkinkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan semakin tinggi pula, akan tetapi jika penghasilan tidak stabil atau tidak rutin maka jelas akan menghambat masyarakat dalam berpartisipasi.

d) Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.?

Yaitu, Pengelolaan Keuangan Desa dikecamatan sinjai utara kabupaten sinjai kantor kelurahan bongki berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Pasal 93 Tahun 2014 adalah kesleuruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

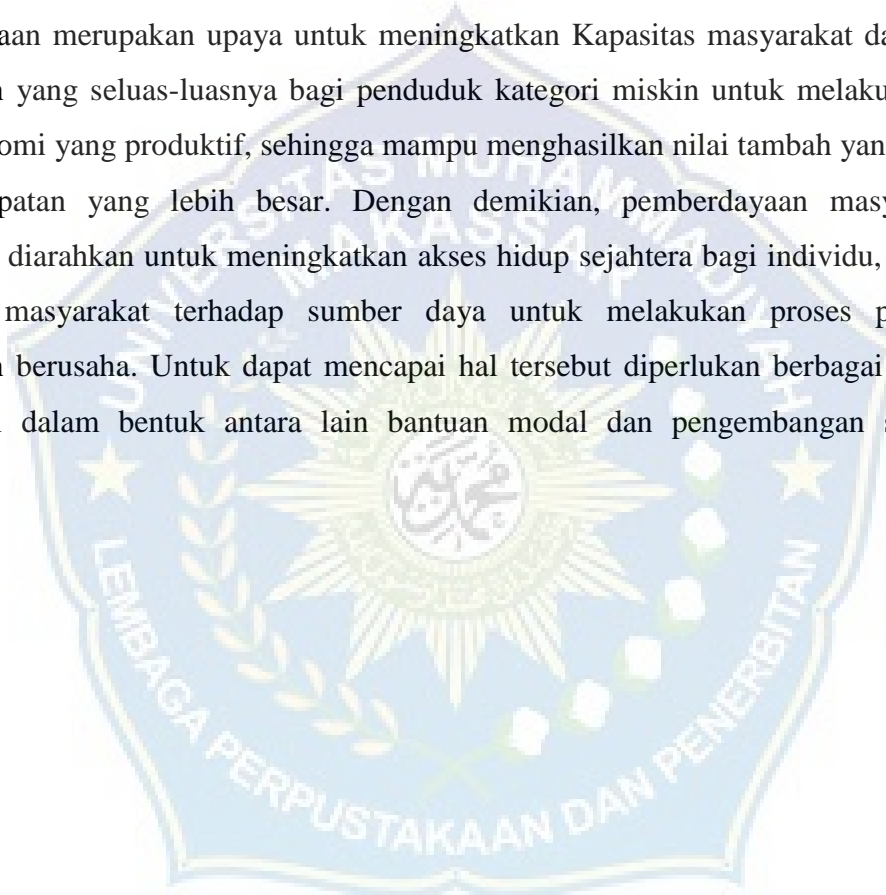
- 1) Perencanaan Pengertian Perencanaan pembangunan menurut Yabbar dan Hamzah (2015) adalah Proses tahapan kegiatan untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya dalam jangka waktu tertentu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan implementasi APBDesa. Tahap pelaksanaan adalah Suatu kegiatan untuk menjalankan APB Desa dalam satu tahun anggaran periode biasanya dari awal tahun tanggal 1 Januari hingga akhir tahun tanggal 31 Desember.
- 3) Penatausahaan Penatausahaan adalah Suatu kegiatan dalam bidang keuangan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur sehingga memperoleh informasi mengenai keuangan. Hasil dari penatausahaan adalah pemberitahuan/laporan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
- 4) Pelaporan Pelaporan adalah Suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode sebagai wujud pelaksanaan pertanggungjawaban atas kewajiban yang diberikan.
- 5) Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan ukuran yang digunakan dalam menghitung tingkat kesesuaian pelayanan diselenggarakan dengan ukuran nilai atau norma yang berlaku di masyarakat.

➤ **Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Menurut Riyadi (dalam Mamesah, 2015) mengatakan bahwa pembangunan merupakan proses kegiatan perubahan yang lebih baik melalui usaha yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Sedangkan menurut Yuwono (dalam Huruta & Sasongko, 2017) pembangunan sebagai perubahan sosial yang berasal dari suatu kondisi yang dipandang lebih bernilai.

Pembangunan menurut Nasution (dalam Hasanah, 2017) yaitu, kemampuan untuk berkembang secara sosial, ekonomi, politik ditingkat dan didalam semua komponen masyarakat secara memungkinkan bangsa yang bersangkutan untuk mengurangi kemiskinan pengangguran dan ketimpangan lalu survive dan berkembang di dunia yang tidak stabil, rumit dan makin tunjuk pada persaingan. Menurut Wahjudin (2011) pemberdayaan adalah usaha yang dilaksanakan dari unsur yang berasal dari luar tatanan sehingga tatanan tersebut dapat dikembangkan. Menurut Noor (2011) Pemberdayaan masyarakat adalah strategi dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai masyarakat untuk membangun pemikiran baru dalam pembangunan yang bersifat participatory.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan Kapasitas masyarakat dan pemberian kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk kategori miskin untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi yang produktif, sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya diarahkan untuk meningkatkan akses hidup sejahtera bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha. Untuk dapat mencapai hal tersebut diperlukan berbagai upaya untuk memotivasi dalam bentuk antara lain bantuan modal dan pengembangan sumber daya manusia.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melihat hasil penelitian yang telah dibahas mengenai “*efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai* ”. di kelurahan Bongki kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai, maka dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian menunjukkan variabel religiusitas pegawai negeri sipil (PNS) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap minat membayar zakat mal di kelurahan Bongki kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai. Itu artinya semakin baik religiusitas pegawai negeri sipil (PNS) maka minat membayar zakat mal di kelurahan Bongki semakin tinggi. Sebaliknya jika religiusitas pegawai negeri sipil (PNS) rendah maka kemungkinan minat membayar zakat mal di kelurahan Bongki menjadi rendah pula.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai saran, yaitu :

- a) Pelaksanaan pembangunan melalui program Dana Desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur
- b) Prioritas dalam pembangunan infrastruktur.
- c) Peran pemerintah dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program Dana Desa
- d) Startegi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana Desa.

Sekian Terimakasih ,Demikianlah dari saya Penutup & Saran untuk Penlitian Dikantor Kelurahan Bongki Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai , Semoga Tahun Kedepannya dapat lebih baik dari tahun kemarin/Sbelumnya & Dapat memberikan Pemberdayaan Pembangunan yang lebih maju lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. (2021). *Skripsi Efektifitas Program BUMdes dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ditinjau dari manajemen bisnis Islam (Studi kasus desa Gantiwarno Pekalongan Lampung Timur)*. 1–77. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/4139>
- Araujo, 2010. (2017). ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В ЗДРАВООХРАНЕНИИ No Title. *Вестник Росздравнадзора*, 6, 5–9.
- ARISTO, J. (2018). *Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo*. 5(1), 126–140. <https://doi.org/10.31227/osf.io/cm7h>
- Aslamiyah, S., & Dzulquarnain, A. H. (2020). Pendampingan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Betoযোগুচি, Kabupaten Gresik. *DedikasiMU (Journal of Community Service)*, 2(3), 472. <https://doi.org/10.30587/dedikasimu.v2i3.1652>
- Aulia, T. R., & Malau, H. (2019). Efektivitas Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat di Nagari Tanjung Balik Kecamatan X Di atas Kabupaten Solok. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(4), 110–118.
- Azizah, C. (2016). *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi pada Desa Sukamerindu Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus)*. 1–23.
- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Chotimah, C., Widodo, R., & Handayani, T. (2019). Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang. *Jurnal Civic Hukum*, 4(2), 103. <https://doi.org/10.22219/jch.v4i2.9184>
- Dana, E., Terhadap, D., Dan, P., Pembangunan, J. E., Ekonomi, F., & Ratulangi, U. S. (2019). Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(02), 131–140.
- Desa, D. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tompaso Ii Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Politico*,

10(4).

- Desa, M.-D. I. (2021). *Bentuk partisipasi masyarakat dalam menghadapipandemicovid-19 di desa pasar lembu kabupaten asahan skripsi.*
- Di, M., & Pandemi, M. (2021). Jurnal proaksi. *JURNAL PROAKSI Journal*, 8(2), 51–60.
- Hidayati, N. (2016). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sidorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. *Skripsi thesis*, 1–24. <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/2660>
- Jeklin, A. (2016). 濟無No Title No Title No Title. *July*, 1–23.
- Kademangan, C.-D. I. K., Probolinggo, K., Yos, J., No, S., & Dringu, P. (2021). *Kata Kunci : Covid-19, Pola Hidup Sehat, Digital Marketing , Pencegahan Covid-19, Pemberdayaan Masyarakat*. 2(1), 50–55.
- KAWOWODE, O., & LONDA, G. B. T. V. Y. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kalinaun Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(55).
- Latif, A., Rusdi, M., Mustanir, A., & Sutrisno, M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Dosen Ilmu Pemerintahan Stisip Muhammadiyah Rappang Dosen Ilmu Administrasi Negara Stisip Muhammadiyah Rappang 5). *Jurnal MODERAT*, 5(1), 1–15. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>
- Machfiroh, A. (2015). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kota Palu. *Jurnal Katalogis*, 3(2), 179–185. <https://media.neliti.com/media/publications/156510-ID-efektivitas-program-nasional-pemberdayaa.pdf>
- Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>
- Mongondow, K. B. (2018). *Issn : 2337 - 5736. 1.*
- No, J. A. P., Pemberdayaan, A., Desa, A. D., Wangsa, D., Motoling, K., Kabupaten, T., Selatan, M., Desa, D., Wangsa, D., Motoling, K., Kabupaten, T., Selatan, M., Apbdes, D., Wangsa, D., Desa, D., Pertanggungjawaban, L., Desa, K. D., Desa, D., Wangsa, D., ... Desa, P. D. (2021). *ISSN 2338 – 9613 JAP No. 108 Vol. VII 2021. VII(108)*, 11–15.
- NORANDA, R. D. (2008). REDWAN DWI NORANDA. *Artikel Redwan DWI*, May. http://eprints.uniska-bjm.ac.id/5989/1/artikel_redwan_DWI.pdf
- Nugraha, A. (2009). Pengembangan Masyarakat Pembangunan Melalui Pendampingan Sosial

- Dalam Konsep Pemberdayaan Di Bidang Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 5, 10.
<http://ejournal.ukanjuruhan.ac.id>
- Pangkey, M. S., & Rompas, W. Y. (n.d.). *Yoyo Bulele*. 1–12.
- Porawouw, R. (2016). Peran Tokoh Masyarakat dalam Meningkatkan Partisipasi Pembangunan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 1154.
- Prasetyo, R. A. (2017). "Peranan Bumdes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan ... *Jurnal Dialektika Volume*, XI(March 2016), 86–100.
- Raintung, A. (2021). sumber 6 (peran) OK. *Jurnal Governance*, 1, No.2(2), 1–9.
- Relationship, K., Community, W., In, B., Prevention, T., Dengue, O., & Fahdi, F. K. (2019). *Supriadi 1* . 034.
- Resdiana, E., & P., I. I. (2020). Efektivitas Dana Desa Dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Marengan Daya Kabupaten Sumenep. *Jurnal Public Corner Fisip Universitas Wiraraja*, 15(1), 48–60.
- Riyansyah, F., Eif, D., Amin, S., & Aziz, R. (2018). Pemberdayaan Home Industry dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Tamkin*, 3(2), 87–109.
<https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin/article/download/363/161>
- Salah., M., Untuk, D., Salah, M., Syarat, S., Gelar, M., Ekonomi, S., & Islam, J. E. (2018). *Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar*.
- Saletti-cuesta, L., Abraham, C., Sheeran, P., Adiyoso, W., Wilopo, W., Brossard, D., Wood, W., Cialdini, R., Groves, R. M., Chan, D. K. C., Zhang, C. Q., Josefsson, K. W., Cori, L., Bianchi, F., Cadum, E., Anthonj, C., NIH Office of Behavioral and Social Sciences, Deci, E. L., Ryan, R. M., ... IOTC. (2020). PENGGUNAAN DANA DESA PADA MASA PANDEMI COVID-19. *Sustainability (Switzerland)*, 4(1), 1–9.
<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/en/mdl-20203177951%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0887-9%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41562-020-0884-z%0Ahttps://doi.org/10.1080/13669877.2020.1758193%0Ahttp://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article>
- Sugiri, L. (2012). Peranan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Publica*, 2(1), 56–65.
- Supatmo. (2015). Peran Petinggi Kampung dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Sumber Sari Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmu*

Pemerintahan Universitas Mulawaarman, 3(1), 212–225.

- Sururi, A. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2). <https://doi.org/10.30656/sawala.v3i2.229>
- Teguh Imam Rahayu, A. G. (2020). *Implementasi penggunaan DD dalam pencegahan covid-19*. 1(21), 144–166.
- Voges, M. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Perkotaan Di Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang. *Jurnal Politico*, 5(1).
- Zakiah, N., OKtavia, L., Khairiyah, F., & Ilman, M. A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 97. <https://doi.org/10.20961/sp.v15i2.43501>



Lampiran-Lampiran



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Syekh.a.abd.alfalah junaid
 Nim : 105431101616
 Jurusan : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
 Judul Penelitian : efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ”.

Rumusan Masalah	Indikator	Sub Indikator	Item Pertanyaan
1. Bagaimanakah efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai	Dana Desa	a) Penyelenggraan pemerintahan	<p>1) Apa yang menjadi landasan / regulasi dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ,Dikabupaten Sinjai Utara?</p> <p>Jawab:</p> <p>a) bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelaksanaan otonomi, maka dalam pengaturan desa dipandang perlu mengatur keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam satu peraturan tersendiri;</p> <p>b) bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan</p>

			<p>Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 15) perlu ditinjau kembali;</p> <p>c) bahwa dengan dasar perimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;</p> <p>2) Apa visi & misi Pemerintah Desa , Dikabupaten Sinjai Utara ?</p> <p>Jawab:</p> <p>Visi; Mewujudkan good local govenruance untuk menciptakan pelayanan prima pada masyarakat.</p> <p>Misi;</p> <p>a) Mewujudkan pelayanan public yang prima di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kelurahan</p>
--	--	--	--

			<p>Bongki kecamatan Sinjai Utara.</p> <p>b) Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan yang terampil dan profesional dalam menunjang kualitas pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>c) Meningkatkan resfonsifitas masyarakat terhadap pelayanan public dan kebijakan pemerintah daerah kabupaten Sinjai.</p> <p>d) Meningkatkan kualitas pelayanan umum terpadu terhadap masyarakat melalui intensitas pengkoordinasian dan pengembangan, pemberdayaan masyarakat serta kesejahteraan sosial</p>
		<p>b) Pelaksanaan pembangunan</p>	<p>1) Bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui program Dana Desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur.</p> <p>Jawab: Sejak tahun 2015, pemerintah mempunyai program untuk membantu</p>

			<p>keuangan desa dengan mengalokasikannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan bantuan dari APBN ini, maka sumber pendapatan desa bertambah lagi dengan jumlah yang cukup besar. Pemberian bantuan keuangan desa ini sebagaimana dicantumkan pada Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya bantuan keuangan bagi desa yang dialokasikan dalam APBN ini disebut dengan Dana Desa.</p> <p>Bantuan keuangan desa yang bersumber dari APBN ini digulirkan Pemerintah Pusat bertujuan agar program pembangunan berjalan secara merata dan adil sampai pada level desa, sehingga pembangunan tidak terpusat pada wilayah-wilayah tertentu saja atau pada level-level tertentu saja. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana mengatur Dana Desa</p>
--	--	--	--

			<p>ditentukan sebesar 10% dari Dana Transfer Daerah (On Top) yang diperuntukkan bagi seluruh desa di Indonesia, namun pengalokasiannya memperhitungkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan di desa, luas wilayah dan kesulitan geografis desa.</p> <p>2) Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur.</p> <p>Jawab: Pembangunan Infrastruktur adalah hal yang berkaitan dengan proses penyediaan pelayanan dasar yang memiliki tujuan sebagai pendukung fungsi pusat-pusat kegiatan pada Sistem Perkotaan demi terciptanya kelancaran aktivitas sosial ekonomi. Maka akan sangat tepat apabila dalam proses Perencanaan Pembangunan Infrastruktur tersebut melibatkan masyarakat secara langsung sesuai dengan hal yang menjadi prioritas kebutuhan, seperti</p>
--	--	--	---

			yang dilakukan pada penelitian kali ini.
		c) Pembinaan kemasyarakatan	<p>1) Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program Dana Desa ?</p> <p>Jawab: Dalam PP No 8 tahun 2016 dana desa yang dimaksud adalah dana desa yang dimaksud adalah dana yang berasal dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Penyaluran untuk dana desa yang bersumber dari APBN yang ditranfer melalui APBD yang di peruntukan untuk desa di lakukan secara bertahap pada bulan april 40%, bulan agustus 40%, dan bulan oktober 20%. Penggunaannya menurut menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal yang tercantum</p>

			<p>dalam Permendes No 21 Tahun 2015 lebih di prioritaskan pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.</p> <p>2) Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana Desa.</p> <p>Jawab: Dalam pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen proses pembangunan desa sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh beberapa pihak di antaranya pemerintah desa sehingga adanya keterlibatan pemerintah desa besar kemungkinan masyarakat akan merasa diberikan peluang atau kesempatan untuk ikut serta dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan tentang apa yang dilakukan,</p>
--	--	--	---

			<p>dalam pelaksanaan program dan pengambilan keputusan untuk berkontribusi sumber daya atau bekerjasama dalam organisasi atau kegiatan khusus, berbagi manfaat dari program pembangunan dan evaluasi program pembangunan.</p>
		<p>d) Pemberdayaan masyarakat</p>	<p>1) Apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?</p> <p>Jawab: BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social Institution) dan komersial (commercial institution). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu</p>

			<p>ditekankan. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tat perundangundangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.</p> <p>2) Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa?</p> <p>Jawab: bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki.</p> <p>Pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kepada kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan dalam arti mempunyai kebebasan bukan saja bebas untuk mengemukakan pendapat tetapi bebas juga dari kelaparan, kebodohan dan</p>
--	--	--	---

			<p>kesakitan. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dalam meningkatkan pendapatnya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.</p>
Community Governance (Tata Kelola Komunitas)	a) Penyelenggaraan Pemerintahan	1) Bagaimana tingkat pencapaian program pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada pamong desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ?	<p>Jawab: Keterpencilan membuat sebagian masyarakat Indonesia sampai saat ini masih ada yang menjalani kehidupan sangat memprihatinkan. Mereka mendiami tempat-tempat yang secara geografis relatif sulit dijangkau. Keterpencilan membuat mereka sangat terbatas dalam mengakses pelayanan sosial dasar, ekonomi dan politik. Pendidikan, kesehatan, serta sarana publik menjadi sesuatu hal yang sangat langka untuk dirasakan oleh kelompok</p>

			<p>masyarakat ini. Sebagai warga negara, mereka belum mampu mengambil bagian dalam proses pembangunan dan terus mengalami ketertinggalan. Mereka itu oleh Departemen Sosial diperkenalkan sebagai Komunitas Adat Terpencil. Komunitas Adat Terpencil menjadi salah satu permasalahan kesejahteraan sosial, sehingga Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang diharapkan dapat memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan Komunitas Adat Terpencil di berbagai wilayah di Indonesia.</p> <p>2) Bagaimana tingkat pencapaian program operasional RT seperti honor tim pelaksana kegiatan, honor harian peserta, pengadaan makan minum rapat RT, pengadaan seragam ketua RT, dan lain sebagainya ?</p> <p>Jawab: Penggunaan Belanja Desa yang ditetapkan dalam</p>
--	--	--	--

			<p>APBDes paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa; operasional Pemerintah Desa; tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan insentif rukun tetangga dan rukun warga diatur rinci dalam ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa. pengaturan tersebut merupakan adopsi dari ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana dalam penjelasan Pasal 100 menjelaskan bahwa yang dimaksud “insentif rukun tetangga dan rukun warga” adalah bantuan kelembagaan yang digunakan untuk operasional rukun tetangga dan rukun</p>
--	--	--	---

			warga.
		b) Pelaksanaan Pembangunan	<p>1) Bagaimana tingkat pencapaian program Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Gedung Milik Desa ?</p> <p>Jawab:</p> <p>a) Memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif banyak.</p> <p>b) Memiliki lahan pertanian yang masih cukup luas.</p> <p>c) Terjalannya hubungan yang sinergis antara pemerintah dan lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada.</p> <p>d) Memiliki sarana perkantoran dan olahraga yang representatif.</p> <p>e) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang cukup besar.</p> <p>f) Adanya komitmen kuat dari pemerintah desa untuk melakukan perubahan.</p> <p>2) Bagaimana tingkat</p>

			<p>pencapaian program Perencanaan Penataan dan Pemeliharaan Lapangan Desa ?</p> <p>Jawab: Lapangan desa merupakan lapangan yang digunakan untuk beberapa kegiatan seperti kegiatan olahraga, penampialan kesenian, dan lain sebagainya. Tanah lapangan milik Desa Pada tahun 2015 Pemerintah Desa berencana melakukan penataan dan pemeliharaan lapangan desa agar lapangan desa tertata rapi dan bersih. Untuk menunjang kegiatan tersebut dilakukan pengadaan alat mesin pemotong rumput. Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini adalah Kepala Seksi Pembangunan.</p>
		<p>c) Pembinaan Kemasyarakatan</p>	<p>1) Bagaimana tingkat pencapaian program Penanggulangan Penyakit Masyarakat ?</p> <p>Jawab: Pemerintah desa membuka kerjasama dalam menanggulangi penyakit</p>

			<p>masyarakat di Desa. Kerjasama dilakukan dengan mahasiswa yang sedang melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa KKN tersebut mengadakan kegiatan penyuluhan Narkoba, dimana yang menjadi peserta kegiatan adalah warga masyarakat dan pamong desa. Yang menjadi pelaksana dan penanggungjawab dalam kegiatan ini adalah kepala seksi pemerintahan. Selain penyakit masyarakat yang berhubungan dengan narkoba adalah penyakit masyarakat yang berkaitan dengan pelacuran.</p> <p>2) Bagaimana tingkat pencapaian program pemberian fasilitas kegiatan PKK ?</p> <p>Jawab: Untuk mendukung dan menunjang kegiatan TP PKK Desa maupun PKK Pedukuhan, Pemerintah Desa memberikan fasilitas berupa ; honor narasumber, honor harian peserta, penyediaan alat tulis kantor,</p>
--	--	--	---

			<p>penggandaan / fotocopy, makan dan minum rapat dan kegiatan, 81 belanja barang dan jasa untuk masyarakat, pengadaan doorprise, pengadaan bibit tanaman herbal, biaya perjalanan dinas kabupaten, serta biaya perjalanan dinas luar kabupaten.</p>
		d) Pemberdayaan Masyarakat	<p>1) Bagaimana tingkat pencapaian program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa?</p> <p>Jawab: Untuk mendukung dan menunjang kegiatan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Pemerintah Desa memberikan fasilitasi berupa ; Alat Tulis Kantor (ATK), fotocopy / penggandaan, makan dan minum rapat dan kegiatan, pengadaan seragam pengurus LPMD, biaya perjalanan dinas dalam kabupaten, maupun biaya perjalanan dinas luar kabupaten di dalam Provinsi.</p> <p>2) Bagaimana tingkat</p>

			<p>pencapaian program Pengembangan Seni Budaya Lokal ?</p> <p>Jawab: Untuk menjaga kelestarian dan mengembangkan seni budaya lokal daerah dan tidak terkontaminasi dengan budaya luar, Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan pengembangan seni budaya lokal dengan memberikan bantuan alat dan kostum kesenian serta barang untuk kelompok seni. Tingkat pencapaian yang diproyeksikan menuju Desa Budaya. Setiap kesenian – kesenian lokal yang ada di masing – masing pedukuhan dilakukan pendampingan.kesenian kesenian yang ada di Desa beberapa sudah didaftarkan di Dinas Pariwisata, supaya dalam melaksanakan kegiatan kegiatan kesenian lokal mendapat tambahan bantuan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai. Yang melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan ini</p>
--	--	--	--

			adalah kepala seksi pemerintahan.
<p>2. Bagaimanakah Dampak efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.?</p>	<p>1) Kepala Desa</p>	<p>Wawancara (1) Nama : Andi Abdul Waris, SE Nip : 19671231 198603 1 014</p>	<p>1) Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?</p> <p>Jawab: Hubungan dalam hal ini juga dapat diartikulasikan sebagai responsivitas masyarakat terhadap program Dana Desa yang diimplementasikan bersama masyarakat dan juga kerjasama dengan pihak ketiga (swasta). Kultur budaya yang terus dijaga antara ketiga aktor community governance tersebut membawa hubungan yang baik, kondusif bagi terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang diharapkan selalu bisa menjaga maupun meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya. Visi dari Lurah Desa “menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung</p>

			<p>jawab untuk mewujudkan masyarakat desa yang demokratis, mandiri, dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan” berkaitan dengan hubungan ketiga aktor community governance tersebut. Banyak program atau kegiatan yang mempunyai nilai untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis, mandiri, dan sejahtera serta berkesadaran lingkungan.</p> <p>2) Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum Musyawarah dalam pembahasan pengelolaan alokasi dana desa tersebut?</p> <p>Jawab: Dengan melalui jalan musyawarah maka kemampuan komunitas dalam mengakses sumber daya dapat diketahui bersama dan dapat diketahui solusi atau langkah – langkah untuk dapat mengakses sumber daya tersebut. Misalnya suatu pedukuhan membutuhkan perbaikan jalan pedukuhan, maka melai musyawarah ketiga aktor community</p>
--	--	--	--

			<p>governance dapat menyusun apa saja yang harus dilakukan untuk merespon yang dibahas dalam musyawarah tersebut dan mengkonsep agar akses sumber daya yang dikehendaki dapat tereliasasi.</p> <p>3) Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa dalam proses perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?</p> <p>Jawab: Trust atau kepercayaan merupakan salah satu modal terpenting antar pemangku kepentingan dalam community governance. Tanpa kepercayaan ketiga aktor pemangku kepentingan dalam community governance tersebut tidak bisa berkorelasi secara baik. Masyarakat memberi amanah kepada pemerintah desa terlebih dalam hal ini kepada lurah, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi</p>
--	--	--	--

			<p>di Desa, begitupun dari pemerintah yang memberikan kepercayaan terhadap warga masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi yang diharapkan. Selain kepercayaan yang diberikan kepada dan oleh masyarakat, pemerintah juga memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga (swasta). Misalnya dalam pembangunan jalan, atau pembuatan saluran irigrasi pemerintah membutuhkan tenaga dari warga masyarakat untuk dilakukan secara swakelola dan juga membutuhkan bahan – bahan material yang dapat diperoleh di toko bangunan, dimana posisi toko bangunan disini merupakan sebagai pihak ketiga. Kemudian dibidang pemberdayaan masyarakat, misalnya dalam program fasilitasi kesiapan siswa menghadapi UAN.</p>
	2) Kaur Keuangan	<p>Wawancara (2) Nama : Ince Muh.Ihlas Ismail, SE Nip : 19770421</p>	1) Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat

		201001 1 014	<p>dalam proses perencanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)?</p> <p>Jawab: Permasalahannya adalah terdapat keterlambatan dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun anggaran 2020 karena memang ada perubahan peraturan yang mengatur tentang Desa berikut pengelolaan keuangan desa. Penyelesaiannya dengan mengusahakan tahun 2021 tidak terjadi keterlambatan dalam penyusunan dan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) tahun anggram 2021.</p> <p>2) Bagaimana pemerintah dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat?</p> <p>Jawab: .</p> <p>a) Untuk wajib pajak yang</p>
--	--	--------------	--

			<p>nilainya tinggi dan alamat tidak jelas diserahkan kepada Dipenda Bantul</p> <p>b) Dalam penarikan PBB terhadap wajib pajak, dukuh dibantu oleh tim dari pemerintah desa baik melalui jemput bola maupun mengundang warga yang belum membayar pajaknya</p> <p>c) Meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB dengan penerangan mobil keliling.</p> <p>d) Mendata atau mencari informasi wajib pajak yang alamatnya kurang jelas.</p> <p>3) Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi Alokasi Dana Desa?</p> <p>Jawab: Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan</p>
--	--	--	---

			<p>tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Akuntabilitas memiliki 3 (tiga) jenis atau macam berdasar pemikiran Mohamad dkk (2004, h.50) yaitu;</p> <p>a) Akuntabilitas keuangan: Pertanggungjawaban yang mencakup laporan keuangan yang terdiri dari pendapatan/penerimaan, penyimpanan, serta pengeluaran.</p> <p>b) Akuntabilitas manfaat: Pertanggungjawaban yang mencakup terkait hasil pencapaian tujuan yang sesuai dengan prosedur dan terpenting dari pencapaian tujuan tersebut adalah efektivitas.</p>
--	--	--	--

			<p>c) Akuntabilitas prosedural: Pertanggungjawaban terkait pada pentingnya prosedur pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas etika, moralitas serta kepastian hukum.</p>
	<p>3) Kaur Perencanaan</p>	<p>Wawancara (3) Nama :Syamsyul Alamat Nip :19791023 200502 1 005</p>	<p>1) Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa?</p> <p>Jawab:</p> <p>Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanisme pencairan dana dan penyaluran Alokasi Dana Desa selengkapnya seperti di bawah ini.</p> <p>a) Pencairan Dana Desa dilakukan bertahap dengan presentase tertentu yang telah</p>

			<p>ditetapkan.</p> <p>b) Pencairan pertama diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai dengan kelengkapan administrasi yang telah ditentukan.</p> <p>c) Pencairan tahap kedua, dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan baik secara administratif, secara teknis dan secara hukum.</p> <p>d) Pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa.</p> <p>e) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas (pemimpin pelaksana kegiatan).</p> <p>2) Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi</p>
--	--	--	--

			<p>yang dilakukan?</p> <p>Jawab:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Usulan anggaran menggunakan Excelb) Menyalin anggaran tahun laluc) Biaya belanja anggaran tidak seragamd) Pengajuan anggaran terlambate) Proses persetujuan yang membutuhkan waktu relatif lama
--	--	--	--



PEDOMAN OBSERVASI

Nama : Syekh.a.abd.alfalah junaid
 Nim : 105431101616
 Jurusan : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
 Judul Penelitian : efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ”.

Rumusan Masalah	Indikator	Sub Indikator	Item Pengamatan	Y (Iya)	T (Tidak)	Keterangan
1. Bagaimana anakah efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai	Dana Desa	a) Penyelenggaraan pemerintahan	1) Apa yang menjadi landasan / regulasi dalam menjalankan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ,Dikabupaten Sinjai Utara?	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>
			2) Apa visi & misi Pemerintah Desa , Dikabupaten Sinjai Utara ?	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>

		b) Pelaksanaan pembangunan	<p>1) Bagaimana pelaksanaan pembangunan melalui program Dana Desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur</p> <p>2) Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur.</p>	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>
		c) Pembinaan kemasyarakatan	<p>1) Bagaimana peran pemerintah dalam membina atau memberi sosialisasi terhadap program Dana Desa ?</p> <p>2) Bagaimana</p>	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>

			<p>strategi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana Desa.</p>			
		d) Pemberdayaan masyarakat	<p>1) Apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?</p> <p>2) Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa?</p>	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>
				<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>
	Community Governance (Tata Kelola Komunitas)	a) Penyelenggaraan Pemerintahan	1) Bagaimana tingkat pencapaian program pemberian penghasilan tetap dan tunjangan kepada pamong	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>

			<p>desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya ?</p> <p>2) Bagaimana tingkat pencapaian program operasional RT seperti honor tim pelaksana kegiatan, honor harian peserta, pengadaan makan minum rapat RT, pengadaan seragam ketua RT, dan lain sebagainya ?</p>	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>
		b) Pelaksanaan Pembangunan	<p>1) Bagaimana tingkat pencapaian program Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor dan Gedung Milik Desa ?</p> <p>2) Bagaimana tingkat pencapaian</p>	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>

			program Perencanaan Penataan dan Pemeliharaan Lapangan Desa ?			
		c) Pembinaan Kemasyarakatan	1) Bagaimana tingkat pencapaian program Penanggulangan Penyakit Masyarakat ?	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>
			2) Bagaimana tingkat pencapaian program pemberian fasilitas kegiatan PKK ?	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>
		d) Pemberdayaan Masyarakat	1) Bagaimana tingkat pencapaian program Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa?	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>
			2) Bagaimana tingkat pencapaian program Pengembangan	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>

			Seni Budaya Lokal ?			
2. Bagaimana anakah Dampak efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di masa pandemi covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai.?	1) Kepala Desa	Wawancara (1)	1) Bagaimana pemerintah desa dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa?	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>
			2) Apakah ada program Musrenbangdes atau Forum Musyawarah dalam pembahasan pengelolaan alokasi dana desa tersebut?	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>
			3) Bagaimana pemerintah desa mengakomodir segala masukan atau usulan dari peserta yang hadir dalam musyawarah desa dalam proses	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>

			perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)?			
	2) Kaur Keuangan	Wawancara (2)	1) Bagaimana peran pemerintah desa dalam mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat dalam proses perencanaan program yang didanai dari Alokasi Dana Desa (ADD)?	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>
			2) Bagaimana pemerintah dalam melaksanakan prinsip transparansi terkait dengan laporan keuangan yang dibuat?	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>
			3) Bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>

			prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan realisasi Alokasi Dana Desa?			
	3) Kaur Perencanaan	Wawancara (3)	1) Bagaimana mekanisme perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa?	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>
			2) Apakah kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan dalam pelaksanaan dan realisasi yang dilakukan?	<i>Iya</i>	-	<i>Baik</i>

LEMBAR DOKUMENTASI

Nama : Syekh.a.abd.alfalah junaid
 Nim : 105431101616
 Jurusan : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
 Judul Penelitian : efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai ”.

Dokumen	Keterangan
Visi & Misi	✓
Struktur Organisasi	✓
Program Kerja	✓
Keadaan Lingkungan & Masyarakat	✓
Keadaan sarana & prasarana	✓
Pearaturan	✓
Kebijakan	✓
Autobiografi/Biografi	✓
Surat	✓
Arsip Keuangan	✓
Foto	✓
Gambar	✓
Sketsa	✓
Patung	✓
Film	✓
Tulisan	✓
Jurnal	✓
Buku	✓
Monograf	✓
	✓

Foto**(Kantor Kelurahan Bongki Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Utara)****(Wawancara)****(Biografi)**



(Posko)



(Kebijakan)



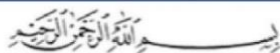
(Patung Nama Kantor Kelurahan bongki)

➤ **Permohonan Kesediaan Pembimbing**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp : 0411-860837 / 860132 (Fas)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : https://fkip.unismuh.ac.id



Nomor : 7012/FKIP/A.4-II/IX/1443/2021
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : Permohonan Kesediaan Membimbing

Kepada Yang Terhormat

1. Dr. A. Rahim, M.Hum.
2. Dr. Suardi, M.Pd.

Di -

Tempat

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sebelumnya kami sampaikan hasil persetujuan Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar pada tanggal, 15-09-2021 perihal pembimbingan penyusunan tugas akhir mahasiswa. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak/Ibu Dosen kiranya berkenan memberikan bimbingan penyusunan tugas akhir mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Syekh.a.abd.alfalah junaid
Stambuk : 105431101616
Efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam
Judul Penelitian : pembangunan dimasa pandemi Covid-19 di
kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih *Jazaakumullahu Khaeran Katsiraan.*

*Wassalamu Alaikum
Warahmatullahi
Wabarakatuh.*

Makassar, 15 Safar 1443 H
22 September 2021 M

Dekan



Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

➤ **Persetujuan Pembimbing Proposal**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Nama : Syekh.a.abd.alfalah junaid

Nim : 105431101616

Program Studi : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan

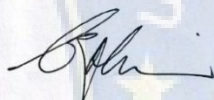
Fakultas : Keguruan & Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa & diteliti ulang, maka proposal ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk ditujikan di hadapan Tim Penguji Proposal Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, April 2022

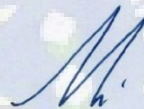
Disetujui Oleh:

Pembimbing I,



Dr. A. Rahim, M.Hum.

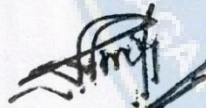
Pembimbing II,



Dr. Suardi, M.Pd.

Mengetahui,

Dekan
FKIP Unismuh Makassar



Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860934

Ketua Prodi
PPKn FKIP Unismuh Makassar

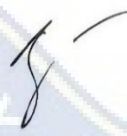
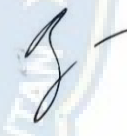
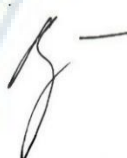


Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988461


➤ **Lembar Konsultasi Bimbingan Proposal**

LEMBAR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Syekh.a.abd.alfalah junaid
 Nim : 105431101616
 Program Studi : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
 Pembimbing I : Dr. A. Rahim, M.Hum.
 Pembimbing II : Dr. Suardi, M.Pd.
 Judul Skripsi : efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1	Sabtu, 09 oktober 2021	Bab. II (dua)	
2	Minggu, 10 oktober 2021	Rumusan masalah efektivitas kerangka berpikir ekonomi Buat definisi operasional	
3	Selasa, 12 oktober 2021	metode penelitian efektivitas ACC	

➤ **Berita Acara Ujian Proposal**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL




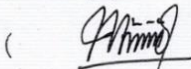
Pada hari ini Reboan..... Tanggal 18 Mei 2022.....14.....H bertepatan tanggal 18...../.....20.....M bertempat diruang kantor Prodi PPKn... kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, telah dilaksanakan seminar Proposal Skripsi yang berjudul :

Dari Mahasiswa :

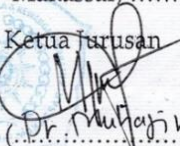
Nama	: <u>Syekh. a. abd. alfalah. junaid</u>
Stambuk/NIM	: <u>105931101616</u>
Jurusan	: <u>Pendidikan pancasila kewarganegaraan</u>
Moderator	:
Hasil Seminar	:
Alamat/Telp	: <u>Jl. Mamoa Raya</u>

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Disetujui

Moderator	: <u>Dr-A. Rahim, M. Hum</u>	()
Penanggap I	: <u>Dra. Jumiati Nur, M. Pd</u>	()
Penanggap II	: <u>Dr. Suardi, M. Pd.</u>	()
Penanggap III	: <u>Musdalifah, Syahwir, S. Pd, M. Pd</u>	()

Makassar, 18 Mei.....2021

Ketua Jurusan
()
(Dr. Muhsin, M. Pd)

➤ **Lembar Perbaikan Proposal**


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL

Nama : Syekh. a. abd. algalah. jumaid.
 Nim : 105431101616
 Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
 Judul : Efektifitas pemberdayaan masyarakat dimasa pandemi
 Covid-19 di kecamatan sinjai utara, kabupaten sinjai

Oleh tim penguji, harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan dan disetujui oleh tim penguji sebagai berikut :

No	Dosen Penguji	Materi Perbaikan	Paraf
1	A. Rahis	1. Kutipan diperbaiki 2. K. Pctm diperbaiki 3. Metode penul. diperbaiki 4. Daftar pustaka.	
2	Jumaidi Nur		
3			
4	Musdalifah Syahrir		

Makassar, ... 18 mei 2021

Ketua Prodi

 (Dr. Munajir M. Pd.)

➤ Pengantar Penelitian



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar
Telp : 0411-860837 / 860132 (Fax)
Email : fkip@unismuh.ac.id
Web : https://fkip.unismuh.ac.id



Nomor : 10264/FKIP/A.4-II/VI/1443/2022
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -
Makassar

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama	: Syekh.a.abd.alfalah junaid
Stambuk	: 105431101616
Program Studi	: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Tempat/Tanggal Lahir	: Ujung pandang / 26-02-1998
Alamat	: Alauddin 2

Adalah yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dan menyelesaikan skripsi dengan judul: Efektivitas pemberdayaan masyarakat dimasa pandemi COVID-19 dikecamatan sinjai utara kabupaten sinjai

Demikian pengantar ini kami buat, atas kerjasamanya dihaturkan *Jazaakumullahu Khaeran Katsiraan.*

*Wassalamu Alaikum
Warahmatullahi
Wabarakatuh.*

Makassar, 24 Dzul Qa'ada 1443 H
23 Juni 2022 M

Dekan



Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860 934

➤ **Surat Keterangan Penelitian Kantor Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
KECAMATAN SINJAI UTARA
KELURAHAN BONGKI**

Jl. Bulu Pattuku No.05 (0482) 23166 ☒ 92615 Sinjai

SURAT KETERANGAN

No: 145/364/Bk-Sut

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara Kab.Sinjai menerangkan bahwa :

N a m a : **SYEKH. A. ABD. ALFALAH JUNAID**
 Nim : 105431101616
 Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Gunung Latimojong Kecamatan Sinjai Utara

Mahasiswa tersebut diatas benar telah mengadakan penelitian di Kelurahan Bongki dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul :

**“ EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIMASA PANDEMI COVIC- 19
DI KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI**

Yang telah dilaksanakan pada tanggal : **27 Juni 2022 s/d 01 Juli 2022**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bongki, 29 Juni 2022

An. **LURAH BONGKI**
 Kepala Pelayanan Umum

MUHAMMAD RUSMIN,S.IP
 NIP. 19790506 200801 1 023

➤ **Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi**

1. Dr. A. Rahim, M.Hum.


KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Syekh.a.abd.alfalah junaid
 NIM : 105431101616
 PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN)
 JUDUL SKRIPSI : efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
 PEMBIMBING : **1. Dr. A. Rahim, M.Hum.**
 2. Dr. Suardi, M.Pd.

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
	16-22	Ikuti petunjuk penulisan Skripsi R. Morlok = 1 Syekh T. Purnalis = 1 Syekh	}
	10/8-22	Bob. II = Perbaikan cara penulisan Perbaikan K. Pekar (= 1 Syekh) Buat Defenisi Operasional Bob. V. Perbaiki	
	21/9-22	Salin Pustaka ketid. podin himp. JNR 12.	} 21/9-22

Catatan:
 Mahasiswa dapat mengikuti ujian skripsi jika telah melakukan pembimbingan minimal 5 (lima) kali dan telah disetujui oleh pembimbing.


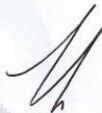




Makassar, 11 Februari 2023
 Mengetahui,
Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan.


Dr. Maftakhir, M.Pd.
 NBM. 988 461

2. Dr. Suardi, M.Pd.

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Syekh.a.abd.alfalah junaid
 NIM : 105431101616
 PROGRAM STUDI : PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN)
 JUDUL SKRIPSI : efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai
 PEMBIMBING : 1. Dr. A. Rahim, M.Hum.
 2. Dr. Suardi, M.Pd.

No	Hari/Tanggal	Uraian Perbaikan	Tanda Tangan
1	Sabtu . 11 februari 2023		
2	— " —		
3	— " —		   

Catatan:

Mahasiswa dapat mengikuti ujian skripsi jika telah melakukan pembimbingan minimal 5 (lima) kali dan telah disetujui oleh pembimbing.

Makassar, 11 februari 2023
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan.


 Dr. Muhajir, M.Pd.
 NBM. 988 461

➤ **Lembar Pengesahan Pembimbing Skripsi**

iii

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dimasa Pandemi Covid-19
Dikecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Nama : Syekh. A. Abd. Alfalah Junaid

Nim : 105431101616

Program Studi : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan

Fakultas : Keguruan & Ilmu Pendidikan

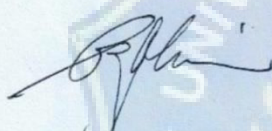
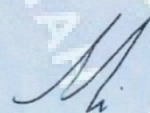
Setelah diperiksa & diteliti ulang, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diujikan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, **11 Februari**, 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(.....)

(.....)

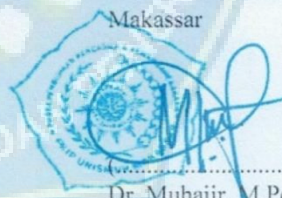
Dr. A. Rahim, M.Hum.

Dr. Suardi, M.Pd.

Mengetahui,

Dekan
FKIP Unismuh Makassar

Ketua Prodi
PPKn FKIP Unismuh
Makassar

(.....)
Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860934

(.....)
Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461

➤ **Lembar Persetujuan Pembimbing Skripsi**

iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Efektifitas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dimasa Pandemi Covid-19
Dikecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai

Nama : Syekh. A. Abd. Alfalah Junaid
Nim : 105431101616
Program Studi : Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan
Fakultas : Keguruan & Ilmu Pendidikan

Setelah diperiksa & diteliti ulang, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diujikan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, **11. Februari** 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(.....)

(.....)

Dr. A. Rahim, M.Hum.

Dr. Suardi, M.Pd.

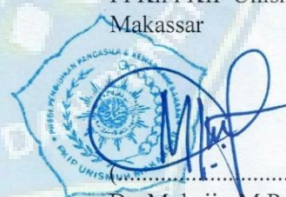
Mengetahui,

Dekan
FKIP Unismuh Makassar

Ketua Prodi
PPKn FKIP Unismuh
Makassar



(.....)
Erwin Akib, M.Pd., Ph.D.
NBM. 860934



(.....)
Dr. Muhajir, M.Pd.
NBM. 988 461

➤ SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Syekh a.abd.alfalah Junaid

NIM : 105431101616

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 28 Februari 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Daftar Riwayat Hidup



Syekh.a.abd.alfalah junaid, lahir di Kecamatan Ujung Pandang pada tanggal 26 Februari 1998. Anak pertama dari pasangan Ayah A.Junaid dan Ibu Ibu Syarifah Nur Fadli. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 06 Paruntun Kecamatan Sinjai Utara tahun 2010. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Utara hingga tamat pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 02 Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Utara dengan mengambil program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Selanjutnya pada tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan (FKIP) dengan mengambil program studi Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKN). Pada tahun 2022 ini akan mengantarkan penulis untuk meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) dengan menyusun karya ilmiah dengan **“efektivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemik covid-19 di kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai”**